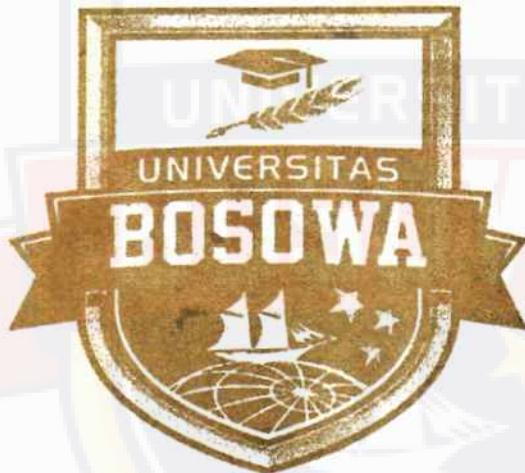


**ANALISIS SISTEM INFORMASI AKUNTANSI KEUANGAN  
DAERAH PADA DINAS PERKEBUNAN  
PROVINSI SULAWESI SELATAN**

Diajukan oleh  
**MAJIDA HASAN**

**4513013042**



**SKRIPSI**  
**Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan**  
**Guna Memperoleh Gelar**  
**Sarjana Ekonomi**

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI FAKULTAS EKONOMI**  
**UNIVERSITAS BOSOWA**  
**MAKASSAR**  
**2017**

**ANALISIS SISTEM INFORMASI AKUNTANSI KEUANGAN  
DAERAH PADA DINAS PERKEBUNAN  
PROVINSI SULAWESI SELATAN**

Diajukan oleh  
**MAJIDA HASAN**

**4513013042**



**SKRIPSI**  
**Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan**  
**Guna Memperoleh Gelar**  
**Sarjana Ekonomi**

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI FAKULTAS EKONOMI**  
**UNIVERSITAS BOSOWA**  
**MAKASSAR**  
**2017**

## HALAMAN PENGESAHAN

**Judul** : Analisis Sistem Informasi Akuntansi Keuangan Daerah  
Pada Dinas Perkebunan Provinsi Sulawesi Selatan

**Nama Mahasiswa** : Majida Hasan

**Stambuk** : 4513013042

**Fakultas** : Ekonomi

**Program Studi** : Akuntansi



**Menyetujui :**

**Pembimbing I**

**Pembimbing II**

Dr. Firman Menne, SE, M.Si. AK. CA

H. I Nyoman Mariantha, SE. M.Si

**Mengetahui dan Mengesahkan :**

Sebagai Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar  
Sarjana Ekonomi Pada Universitas Bosowa

**Dekan Fakultas Ekonomi  
Universitas Bosowa**

Dr. A. Arifuddin Mane, SE, M.Si, SH, MH

**Ketua Program Studi  
Akuntansi**

Thanyain, SE., M.Si

Tanggal Pengesahan:

## DAFTAR ISI

	Halaman
<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	i
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	ii
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	iii
<b>ABSTRAK</b> .....	vi
<b>ABSTRACT</b> .....	vii
<b>PERNYATAAN KEORSINILAN SKRIPSI</b> .....	viii
<b>DAFTAR ISI</b> .....	ix
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	xii
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	1
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Rumusan Masalah .....	4
1.3 Tujuan Penelitian.....	4
1.4 Kegunaan Penelitian.....	4
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b> .....	6
2.1 Kerangka Teori .....	6
2.1.1 Pengertian Sistem .....	6
2.1.2 Pengertian Informasi .....	8
2.1.3 Pengertian Akuntansi .....	8
2.1.4 Pengertian Sistem Informasi Akuntansi (SIA).....	9
2.1.5 Tujuan dan Fungsi SIA .....	9
2.1.6 Karakteristik Sistem Informasi Akuntansi .....	11
2.1.7 Peran Sistem Informasi Akuntansi .....	12
2.1.8 Unsur – Unsur Sistem Informasi Akuntansi .....	12
2.2 Sistem Akuntansi Keuangan Daerah .....	13

<b>BAB V KESIMPULAN DAN SARAN .....</b>	<b>72</b>
5.1 Kesimpulan.....	72
5.2 Saran.....	75

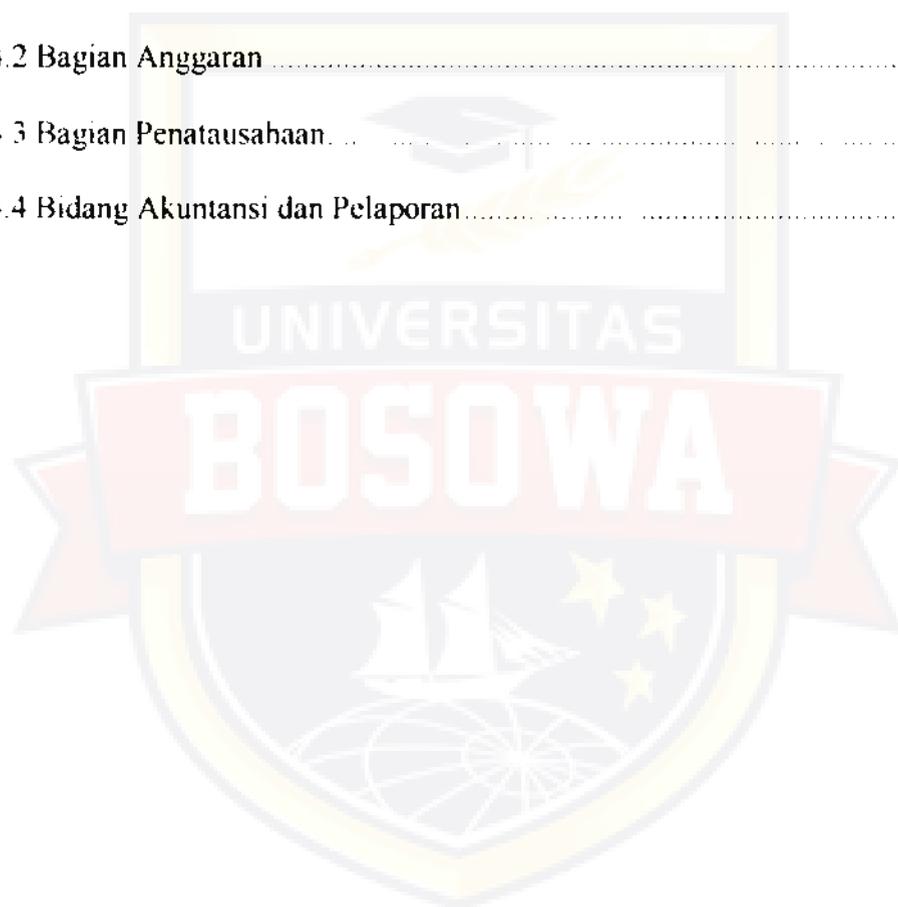
**DAFTAR PUSTAKA**



## DAFTAR GAMBAR

Gambar

Gambar 2.1 Siklus Akuntansi .....	17
Gambar 2.2 Kerangka Pikir .....	30
Gambar 4.1 Struktur Organisasi .....	38
Gambar 4.2 Bagian Anggaran .....	51
Gambar 4.3 Bagian Penatausahaan .....	52
Gambar 4.4 Bidang Akuntansi dan Pelaporan .....	53



## KATA PENGANTAR



Puji dan syukur peneliti panjatkan kehadiran Allah SWT atas berkat limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga peneliti dapat menyelesaikan Hasil Penelitian ini sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar SE dengan judul **“Sistem Informasi Akuntansi Keuangan Daerah Pada Dinas Perkebunan Provinsi Sulawesi Selatan”**. Teriring salam dan shalawat semoga tercurahkan kepada teladan dan junjungan kita Rasulullah Nabi Muhammad SAW, beserta keluarga, sahabat, dan orang-orang yang senantiasa istiqamah mengikuti jalan dakwahnya hingga akhir zaman.

Sebuah karya sebenarnya sangat sulit dikatakan sebagai usaha satu orang tanpa bantuan orang lain, begitu pula dengan Hasil Penelitian ini tidak dapat terselesaikan tanpa dorongan dan sumbangsih pemikiran dari berbagai pihak. Terkhusus untuk kedua orangtua tercinta yang selalu mendukung dan mendoakan setiap langkah ananda, kepada keluarga tercinta yang selalu memberikan semangat, kasih sayang, perhatian dan do'a untuk keberhasilan ananda, dan tercinta terima kasih atas doa dan dukungannya. Dengan segala kerendahan dan ketulusan hati peneliti mengucapkan terima kasih kepada:

1. Pertama-tama ucapan terima kasih penulis berikan kepada Rektor Universitas Bosowa Bapak Prof.Dr.Ir. Saleh Pallu,M.Eng
2. Bapak Dr.H.A. Arifuddin Mane, SE, M.St. SH., MH selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Bosowa Makassar

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Perkembangan teknologi informasi memberikan tantangan tersendiri pada berbagai aspek kehidupan sehari-hari. Tanpa penguasaan dan pemahaman akan teknologi informasi ini, tantangan globalisasi akan menyebabkan ketergantungan yang tinggi terhadap pihak lain dan hilangnya kesempatan untuk bersaing karena minimnya pemanfaatan teknologi informasi.

Mengingat perkembangan teknologi informasi yang demikian pesat, maka upaya pengembangan dan penguasaan teknologi informasi yang didasarkan pada kebutuhan sendiri haruslah mendapat perhatian maupun prioritas yang utama untuk dapat menjadi masyarakat yang lebih maju.

Dalam pengelolaan keuangan daerah, penggunaan teknologi informasi merupakan suatu kebutuhan yang harus dipenuhi untuk membantu pengelolaan data yang lebih cepat, efektif, dan efisien. Software Sistem Informasi Keuangan Daerah adalah seperangkat aplikasi computer yang digunakan untuk membantu proses administrasi data keuangan pemerintah daerah.

Informasi akuntansi yang dihasilkan dalam bentuk laporan keuangan dapat berbeda tergantung dari segi kegiatan dan tujuan dari perusahaan atau lembaga tersebut. Pada perusahaan komersial kegiataannya lebih menitikberatkan pada pencapaian keuntungan usaha semaksimal mungkin (*profit oriented*) sedangkan organisasi pemerintahan lebih bersifat melayani dan mengutamakan peningkatan kesejahteraan masyarakat. karena sifat dan karakteristik yang berbeda itulah maka

bentuk dan penyusunan laporan keuangannya pun harus disusun sesuai dengan tujuan perusahaan atau lembaga tersebut.

Dalam waktu yang relatif singkat, akuntansi sektor publik telah mengalami perkembangan yang sangat pesat. Fenomena yang dapat diamati dalam perkembangan sektor publik dewasa ini adalah semakin menguatnya tuntutan pelaksanaan akuntabilitas publik oleh organisasi sektor publik (seperti: pemerintahan pusat dan daerah, unit-unit kerja pemerintah, departemen dan lembaga-lembaga Negara). Tuntutan akuntabilitas sektor publik terkait dengan perlunya dilakukan transparansi dan pemberian informasi kepada publik dalam rangka pemenuhan hak-hak publik.

Informasi akuntansi merupakan bagian yang terpenting dari seluruh informasi yang diperlukan oleh perusahaan. Informasi akuntansi terutama berhubungan dengan data keuangan dari suatu perusahaan. Agar data keuangan yang ada dapat dimanfaatkan oleh pihak perusahaan maupun pihak diluar perusahaan, Maka data tersebut perlu disusun dalam bentuk-bentuk yang sesuai. Diperlukan suatu sistem yang mengatur dan pengolahan data akuntansi dalam perusahaan untuk dapat menghasilkan informasi yang sesuai dan dalam bentuk yang sesuai juga.

Akuntansi keuangan daerah merupakan salah satu bidang dalam akuntansi sektor publik yang mendapat perhatian besar dari berbagai pihak semenjak reformasi. Banyak aspek yang muncul dari adanya reformasi keuangan daerah. Namun, yang paling umum menjadi sorotan bagi pengelola keuangan daerah adalah adanya aspek perubahan yang mendasar dalam pengelolaan anggaran daerah (APBD). Perhatian utama adalah adanya paradigma baru dalam manajemen

anggaran daerah (Halim: 2001: 16) yaitu paradigma menuntut lebih besarnya akuntabilitas dan transparansi dari pengelolaan anggaran dan dengan memperhatikan asas keadilan dan kepatutan.

Informasi akuntansi keuangan disusun terutama untuk menghasilkan informasi yang biasanya dalam bentuk laporan keuangan yang ditunjukkan pada pihak-pihak diluar perusahaan. Umumnya laporan keuangan yang dihasilkan terdiri dari neraca, laporan rugi laba, laporan perubahan modal, dan laporan perubahan posisi keuangan. laporan-laporan ini merupakan ringkasan dari keadaan perusahaan yang mempunyai kepentingan terhadap perusahaan seperti langganan, pemegang saham, kreditur, bank, kantor, pajak, dan lain-lainnya. Oleh karena laporan ini ditunjukkan pada pihak diluar perusahaan, maka cara penyajian dan isinya diatur oleh prinsip akuntansi yang lazim.

Salah satu tujuan akuntansi keuangan daerah adalah menyediakan informasi keuangan yang lengkap, cermat dan akurat sehingga dapat menyajikan laporan keuangan yang andal, dapat dipertanggungjawabkan, dan dapat digunakan sebagai dasar untuk mengevaluasi pelaksanaan keuangan masa lalu dalam rangka pengambilan keputusan ekonomi oleh pihak eksternal pemerintah daerah (masyarakat, para wakil rakyat/lembaga pengawas dan lembaga pemeriksa, pihak yang member donasi investasi/pinjaman dan pemerintah) untuk masa yang akan datang. Laporan keuangan pemerintah tidak hanya dirancang untuk memenuhi tujuan spesifik dari masing-masing kelompok pengguna karena informasi yang disajikan dalam laporan keuangan bertujuan untuk guna memenuhi kebutuhan dari semua kelompok pengguna. Untuk memenuhi tujuan tersebut, Laporan keuangan

pemerintah daerah menyajikan informasi mengenai pendapatan, belanja, pembiayaan, asset, kewajiban, ekuitas dana, dan arus kas pemerintah daerah.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas maka penulis memilih judul **“Analisis Sistem Informasi Akuntansi Keuangan Daerah Pada Dinas Perkebunan Provinsi Sulawesi Selatan”**

## **1.2 Perumusan Masalah**

Adapun permasalahan yang dirumuskan dalam penelitian ini adalah **“Bagaimana penerapan sistem informasi akuntansi keuangan daerah pada Dinas Perkebunan Provinsi Sulawesi Selatan ?”**

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan dari penelitian ini yaitu, Untuk mengetahui penerapan sistem informasi akuntansi keuangan daerah pada Dinas Perkebunan Provinsi Sulawesi Selatan.

## **1.4 Kegunaan Penelitian**

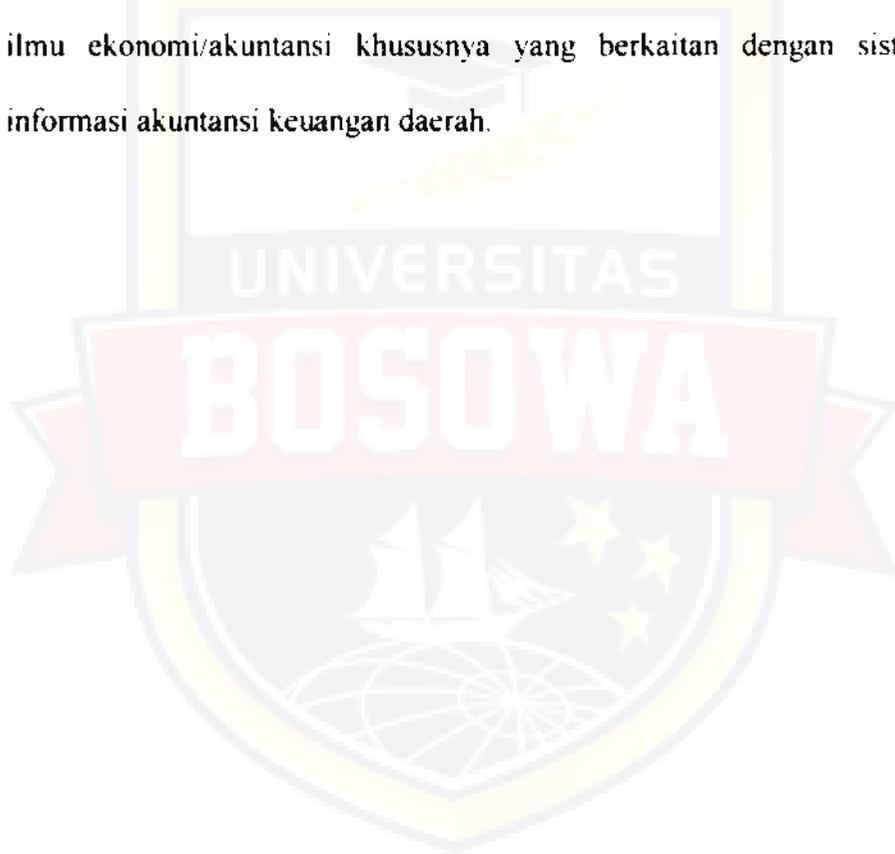
Sebagai suatu harapan penulis dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Kegunaan teoritis
  - a. Bagi penulis, berguna untuk menambah ilmu pengetahuan, pengalaman, pemahaman yang lebih baik terutama mengenai sistem informasi akuntansi keuangan daerah.
  - b. Bagi instansi pemerintah, dapat menjadi konstribusi yang bermanfaat bagi manajemen dalam mengelola perusahaan, dan dapat dijadikan bahan pertimbangan dalam menganalisis seberapa penting pengaruh sistem informasi akuntansi keuangan daerah terhadap instansi pemerintah.

- c. Bagi instansi pemerintah lain berguna sebagai bahan referensi atau menjadi salah satu sumber informasi bagi yang membutuhkan dan ingin mendalami tentang sistem informasi akuntansi keuangan daerah.

## 2. Kegunaan Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi wahana untuk mengembangkan ilmu ekonomi/akuntansi khususnya yang berkaitan dengan sistem informasi akuntansi keuangan daerah.



## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **2.1 Kerangka Teori**

##### **2.1.1 Pengertian Sistem**

Sistem menurut Kristanto Andri ( 2007 : 1 ) Sistem adalah “ Jaringan kerja dari prosedur-prosedur yang saling berhubungan, berkumpul bersama-sama untuk melakukan suatu kegiatan atas untuk menyelesaikan suatu sasaran tertentu. Serta kumpulan dari eemen-elemen yang berinteraksi untuk mencapai suatu tujuan tertentu.

Mendefinisikan sistem sebagai sesuatu yang memiliki bagian-bagian yang saling berinteraksi untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu melalui 3 (tiga) tahapan yaitu input, proses, dan output yang dikemukakan oleh Widjajanto (2001 : 2).

Dari definisi tersebut ada 2 (dua) syarat sesuatu dapat disebut sebagai sistem, yaitu :

1. Memiliki bagian-bagian yang saling berinteraksi dengan maksud untuk mencapai tujuan tertentu.
2. Sistem harus memiliki tiga unsur yaitu : input, proses, dan output. Input merupakan penggerak atau pemberi tenaga dimana sistem itu dioperasikan. Output adalah hasil operasi sedangkan proses adalah aktivitas yang mengubah input menjadi output.

Dari definisi diatas, dapat disimpulkan bahwa suatu sistem pada dasarnya adalah komponen-komponen yang erat berhubungan satu dengan yang lainnya, yang berfungsi bersama-sama untuk mencapai tujuan tertentu.

Konsep sistem mengelompokkan sistem kedalam empat kelompok seperti yang dikemukakan oleh Krismiaji (2005 :12) menyatakan bahwa :

1. Sistem tertutup
2. Sistem relatif tertutup
3. Sistem terbuka
4. Sistem umpan balik

Dari keempat macam sistem tersebut dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Sistem tertutup yaitu sistem yang secara total terisolasi lingkungan tidak ada penghubung dengan pihak eksternal sehingga sistem ini tidak memiliki pengaruh dapat dipengaruhi oleh lingkungan yang berada diluar batas sistem.
2. Sistem relatif tertutup yaitu sistem yang berinteraksi dengan lingkungan secara tidak terkendali. Sistem semacam ini memilih penghubung yang menghubungkan sistem dengan lingkungannya dan mengendalikan pengaruh lingkungan terhadap proses yang dilakukan oleh sistem.
3. Sistem terbuka yaitu yang berinteraksi dengan lingkungan secara tidak terkendali, Sistem terbuka juga memperoleh gangguan, atau input yang tidak terkendali akan mempengaruhi proses dalam sistem. Sistem yang dirancang dengan baik dapat meminimumkan gangguan tersebut dengan cara melakukan antisipasi terhadap kemungkinan munculnya gangguan dari lingkungan dan selanjutnya menciptakan proses dan cara menanggulangi gangguan tersebut.
4. Sistem umpan balik yaitu yang digunakan sebagai *output* menjadi salah satu *input* untuk proses yang aman di masa berikutnya.

### 2.1.2 Pengertian informasi

Menurut Kristanto Andri (2007:7) Informasi adalah : “Kumpulan data yang diolah menjadi bentuk yang lebih berguna dan lebih berarti bagi yang menerimanya.

Menurut Witarto dalam bukunya memahami sistem informasi (2004:9) Informasi adalah Rangkaian data yang mempunyai sifat sementara, tergantung dengan waktu, mampu memberi kejutan atau surprise pada yang menerimanya. Informasi dapat juga dikatakan sebagai data yang telah diproses, yang mempunyai nilai tentang tindakan atau keputusan.

Berdasarkan pendapat para ahli tersebut maka dapat disimpulkan informasi adalah data yang telah proses kemudian diolah menjadi bentuk yang lebih berguna, digunakan untuk mengambil keputusan

### 2.1.3 Pengertian Akuntansi

*American Accounting Association* dalam Soemarso (2009: 5) Mendefenisikan akuntansi sebagai proses mengidentifikasi, mengukur, melaporkan informasi ekonomi, Untuk memungkinkan adanya penilaian dan keputusan yang jelas dan tegas bag mereka yang menggunakan informasi tersebut.

Definisi ini mengandung dua ( 2) beberapa pengertian yakni :

1. Bahwa akuntansi merupakan proses yang terdiri dari identifikasi, pengukuran, dan pelaporan informasi ekonomi.
2. Bahwa informasi ekonomi yang dihasilkan oleh akuntansi diharapkan berguna dalam penilaian dan pengambilan keputusan mengenai kesatuan usaha yang bersangkutan.

Romney dan Steinbart (2006 : 473) Mendefinisikan sistem informasi sebagai cara teratur untuk mengumpulkan, memproses, mengelola, dan melopakan informasi agar organisasi dapat mencapai tujuan dan sasarannya.

#### **2.1.4 Pengertian Sistem Informasi Akuntansi (SIA)**

Menurut Romney dan Steinbart (2015 : 10) Sistem informasi akuntansi adalah suatu sistem yang mengumpulkan, mencatat, menyimpan, dan mengolah data untuk menghasilkan informasi bagi pengambil keputusan.

Bodnar dan hopwood (2006 : 3) Menyatakan bahwa, Sistem informasi akuntansi merupakan kumpulan sumber daya, seperti manusia dan peralatan yang dirancang untuk mengubah data keuangan dan data lainnya ke dalam informasi, Informasi tersebut dikomunikasikan kepada para pembuat keputusan.

Sedangkan menurut Mulyadi (2001 : 3) "Sistem akuntansi adalah organisasi formulir catatan dan laporan yang dikoordinasi sedemikian rupa untuk menyediakan informasi keuangan yang dibutuhkan oleh manajemen guna mempermudah pengelolaan perusahaan."

Berdasarkan dari teori diatas, maka dapat disimpulkan bahwa sistem informasi akuntansi dibangun untuk menyajikan informasi keuangan yang dibutuhkan pihak manajemen, yang diperoleh dari pengumpulan dan pemrosesan data keuangan sehingga dapat dijadikan sebagai dasar bagi perusahaan untuk mencapai tujuan.

#### **2.1.5 Tujuan dan Fungsi Sistem Informasi Akuntansi (SIA)**

Tujuan utama sistem informasi akuntansi menurut Jogiyanto (2003 : 227) sistem informasi akuntansi memiliki 3 (tiga) tujuan, sebagai berikut:

- a. Mendukung operasi sehari-hari.
- b. Mendukung pengambilan keputusan manajemen
- c. Memenuhi kewajiban yang berhubungan dengan pertanggung jawaban

Jadi tujuan sistem informasi akuntansi dapat disimpulkan, sebagai berikut untuk memberikan sistem informasi yang cepat.

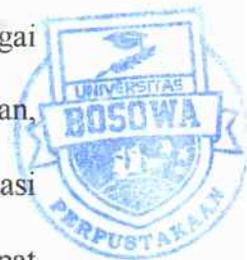
- a. Untuk memberikan informasi yang efisien
- b. Untuk memberikan informasi akuntansi yang dapat dipercaya keandalannya
- c. Untuk memberikan informasi akuntansi yang berguna untuk perencanaan, pengendalian, dan pengambilan keputusan manajemen

Fungsi utama sistem informasi akuntansi adalah sebagai berikut :

Mendorong seoptimal mungkin, agar dapat menghasilkan berbagai informasi akuntansi yang berkualitas yaitu informasi yang tepat waktu, relevan, akurat (dapat dipercaya) dan lengkap, yang secara keseluruhan informasi akuntansi tersebut mengandung arti dan berguna. Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa sistem informasi akuntansi harus berguna, tepat waktu, dan relevan untuk pengambilan keputusan serta meningkatkan pelayanan dalam memberikan informasi yang berguna bagi pihak manajemen dalam rangka mencapai tujuan suatu perusahaan.

Romney dan Steinbart (2004 : 3) Menjelaskan tiga fungsi suatu sistem informasi akuntansi yaitu :

- a. Mengumpulkan dan menyimpan data tentang aktivitas-aktivitas yang dilaksanakan oleh organisasi, sumber daya yang dipengaruhi oleh



aktivitas-aktivitas tersebut, agar pihak manajemen, para pegawai, dan pihak-pihak luar yang berkepentingan dalam meninjau ulang (review) hal yang telah terjadi.

- b. Mengubah data menjadi informasi yang berguna bagi pihak manajemen untuk membuat keputusan dalam aktivitas perencanaan, pengawasan, dan pelaksanaan.
- c. Menyediakan pengendalian yang memadai untuk menjaga asset-asset organisasi, Termasuk data organisasi, untuk memastikan bahwa data tersebut tersedia saat dibutuhkan, akurat dan handal.

#### **2.1.6 Karakteristik Sistem Informasi Akuntansi (SIA)**

Dibawah ini merupakan karakteristik sistem informasi akuntansi :

- a. SIA melaksanakan tugas yang diperlukan  
SIA hanya melakukan tugas yang hanya diperlukan oleh pemakaian informasi saja.
- b. Berpegang pada prosedur yang relatif standar  
SIA bekerja sesuai dengan peturan-peraturan yang mengikuti standar perusahaan
- c. Menangani data terinci  
Data yang ditangani SIA merupakan data yang sudah jelas dan lengkap
- d. Berfokus historis  
Data yang ditangani lebih difokuskan ada data yang telah dimiliki perusahaan sebelumnya.
- e. Menyediakan informasi pemecahan masalah

SIA bertugas menyediakan berbagai macam informasi dalam pemecahan suatu masalah untuk lebih memudahkan dalam penyelesaiannya.

### **2.1.7 Peran Sistem Informasi Akuntansi (SIA)**

Adapun peranan penting sistem informasi akuntansi adalah sebagai berikut:

- a. Memperbaiki kualitas dan mengurangi biaya dalam menghasilkan barang/jasa
- b. Memperbaiki efisiensi
- c. Memperbaiki pengambilan keputusan
- d. Menciptakan keunggulan kompetitif

### **2.1.8 Unsur – Unsur Sistem Informasi Akuntansi (SIA)**

Unsur-unsur yang dapat mempengaruhi penerapan SIA dalam perusahaan:

- a. Setiap sistem yang tertuangkan dalam kertas tidak akan efektif dalam penerapannya kecuali seorang akuntan dapat mengetahui kebutuhan akan orang-orang yang terlibat dalam sistem informasi tersebut

- b. Metode kuantitatif

Dalam menyusun informasi seorang akuntan harus menggunakan metode ini untuk meningkatkan efektifitas dan nilai dari informasi tersebut.

- c. Komputer

Pada beberapa perusahaan, computer telah digunakan untuk menggantikan pekerjaan rutin seorang akuntan, sehingga memberikan

waktu yang lebih banyak kepada akuntan untuk dapat terlibat dalam proses pengambilan keputusan.

## **2.2 Sistem informasi Akuntansi Keuangan Daerah**

### **2.2.1 Pengertian Sistem Akuntansi Keuangan Daerah**

Sistem akuntansi keuangan daerah diartikan sebagai sistem yang mengelola semua transaksi keuangan, asset, kewajiban, dan ekuitas dana pemerintah daerah yang menghasilkan informasi keuangan dan laporan keuangan yang tepat dengan mutu yang dapat diandalkan.

Keuangan daerah merupakan segala sesuatu baik berupa uang maupun barang yang dapat dijadikan kekayaan daerah sepanjang belum dimiliki atau dikuasai oleh Negara atau pihak lain sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Menurut Abdul Halim (2004:35) Akuntansi keuangan daerah adalah proses pengidentifikasian, pencatatan, dan pelaporan transaksi ekonomi (keuangan) dari entitas pemerintah (kab, kota, atau prov) yang memerlukan. Sumber-sumber penerimaan daerah terdiri atas sisa daerah (PAD), Sumbangan dan bantuan serta penerimaan pembangunan. Kebijakan keuangan daerah senantiasa diarahkan pada tercapainya sasaran pembangunan. Terciptanya perekonomian daerah yang mandiri sebagai usaha atas asas kekeluargaan berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 dengan meningkatkan kemakmuran rakyat semata.

### **2.2.2 Kedudukan Akuntansi Keuangan Daerah Dalam Akuntansi**

Ditinjau dari entitas penyusunan laporan keuangan, maka akuntansi terbagi menjadi akuntansi sektor privat akuntansi sektor publik. Akuntansi yang berkaitan

dengan perusahaan (bisnis) dikenal dengan akuntansi sektor privat dan yang berkaitan dengan organisasi pemerintahan atau lembaga non-profit dikenal dengan akuntansi pemerintahan atau akuntansi sektor publik, Karenanya akuntansi keuangan daerah termasuk kedalam akuntansi sektor publik.

Selain klasifikasi tersebut, akuntansi dikelompokkan berdasarkan pemakai laporan keuangan yang terbagi menjadi dua yaitu, akuntansi keuangan dan akuntansi manajemen. Akuntansi keuangan adalah akuntansi yang ditujukan untuk menyediakan informasi bagi pihak-pihak luar entitas pembuat laporan keuangan, sedang akuntansi, Manajemen adalah akuntansi yang ditujukan untuk menyediakan informasi bagi pihak dalam entitas pembuat laporan keuangan.

### **2.2.3 Sistem pencatatan dan dasar pengakuan akuntansi keuangan daerah**

Sistem pencatatan (Halim,2002:39) adalah himpunan standar-standar akuntansi yang menetapkan kapan dampak keuangan dari transaksi-transaksi dan peristiwa-peristiwa lainnya harus diakui untuk tujuan pelaporan keuangan.

Ada beberapa macam pencatatan yang digunakan yaitu :

a. *Single entry*

Sistem pencatatan *single entry* sering disebut juga dengan sistem tata buku tunggal atau tata buku saja. Dalam sistem ini pencatatan transaksi ekonomi dilakukan dengan mencatatnya satu kali transaksi yang berakibat bertambahnya kas akan dicatat pada sisi penerimaan dan transaksi yang berakibat berkurangnya kas akan dicatat pada sisi pengeluaran.

b. *Double Entry*

Sistem pencatatan *double entry* juga sering disebut tata buku berpasangan. Pencatatan dengan sistem ini ada sisi debet atau kredit. Setiap pencatatan harus menjaga keseimbangan persamaan dasar akuntansi.

c. *Triple Entry*

Sistem pencatatan *triple entry* adalah pelaksanaan pencatatan dengan menggunakan sistem pencatatan *double entry*, ditambah dengan pencatatan pada buku anggaran. Oleh sebab itu, Sementara sistem pencatatan *double entry* dijalankan, Sub bagian pembukuan (bagian keuangan) pemerintah juga mencatat transaksi tersebut yang akan berefek pada buku anggaran, Sehingga pencatatan tersebut akan berefek pada sisi anggaran.

Entry artinya setiap transaksi ekonomi dicatat dua kali pencatatan. Akuntansi keuangan daerah menggunakan sistem pencatatan berpasangan (double) dinamakan menjurnal. Pencatatan harus menjaga persamaan dasar akuntansi, kedua sisi harus seimbang.

#### 2.2.4 Dasar Pengakuan Akuntansi Keuangan Daerah

Pengakuan (*Recognition*) adalah penentuan kapan suatu transaksi dicatat. Untuk menentukan kapan suatu transaksi dicatat digunakan berbagai sistem/basis/dasar akuntansi

Dasar akuntansi terbagi 4 yaitu :

- a. Basis kas (*cash Basis*)

b. Basis akrual (*accrual basis*)

Basis akrual adalah dasar akuntansi yang mengakui transaksi dan peristiwa itu terjadi (dan bukan hanya saat kas atau setara kas diterima atau dibayar). Oleh karena itu, Transaksi-transaksi dan peristiwa-peristiwa dicatat dalam pelaporan keuangan pada periode terjadinya.

c. Basis kas modifikasian (*Modified cash basis*)

Basis ini mencatat transaksi selama tahun anggaran dan melakukan penyesuaian pada akhir tahun anggaran berdasarkan basis akrual.

d. Basis akrual Modifikasian (*modified accrual basis*)

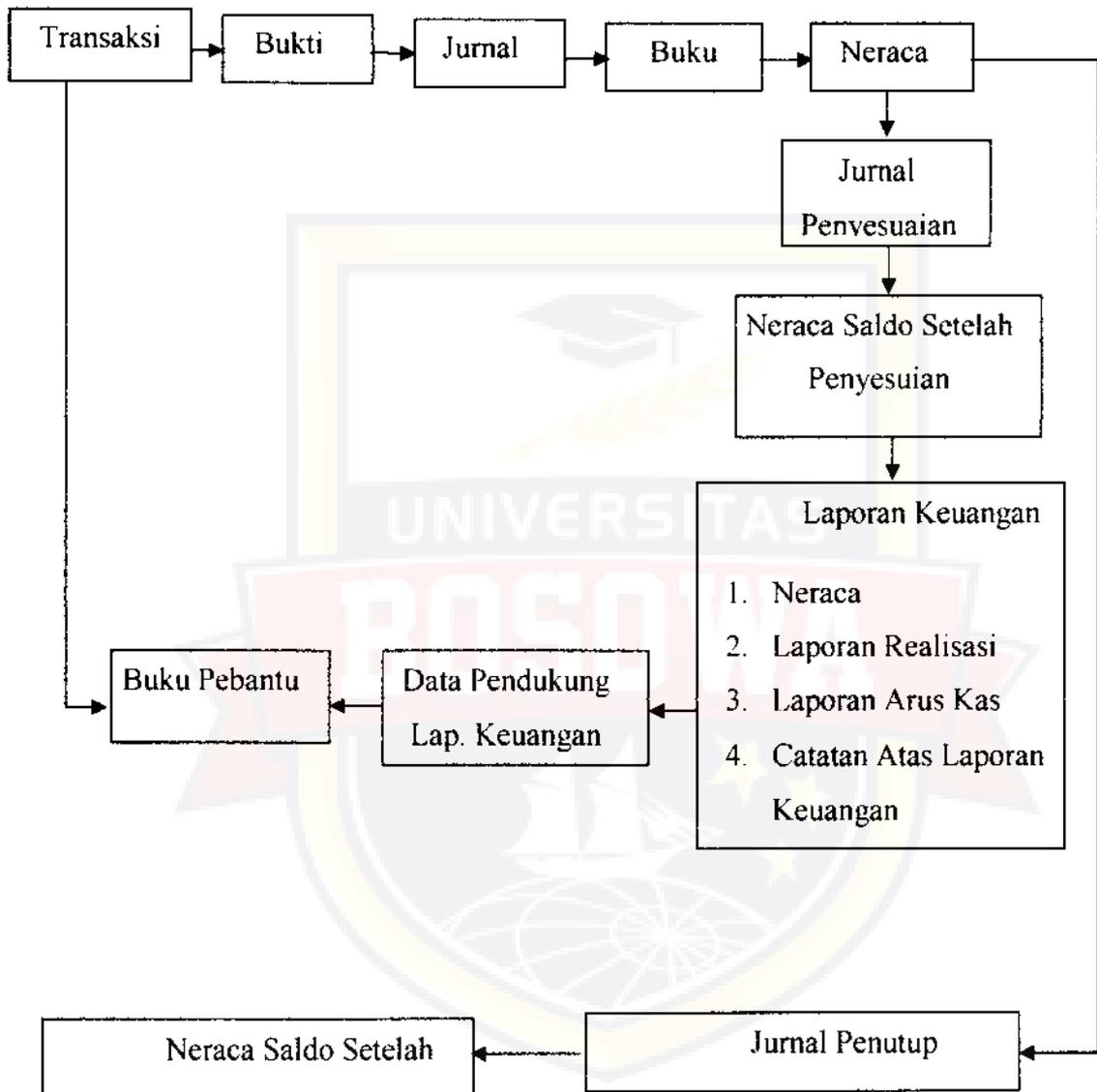
Basis ini mencatat transaksi dengan menggunakan basis akrual kas untuk transaksi-transaksi tertentu dan menggunakan basis akrual untuk sebagian besar transaksi. Pembatasan penggunaan dasar akrual dilandasi oleh pertimbangan kepraktisan.

### 2.2.5 Siklus Akuntansi Keuangan Daerah

Proses akuntansi adalah proses menganalisis transaksi, mencatat, mengklasifikasikan dan meringkaskan informasi untuk ditampilkan dalam laporan akuntansi. Proses tersebut berjalan terus-menerus dan berulang kembali sehingga merupakan suatu arus berputar (siklus).

Gambar 2.1

## Siklus Akuntansi



Sumber : Ainil Mardiah, Tahun 2010

Berdasarkan gambar diatas transaksi-transaksi dalam siklus akuntansi terdiri atas :

a) Transaksi

Yaitu kegiatan yang mengubah posisi keuangan suatu entitas dan pencatatannya dengan buku/bukti/dokumen pendukung dalam kegiatan operasi suatu entitas.

b) Bukti Transaksi

Transaksi yang terjadi pertama-tama akan direkam dalam formulir sehingga formulir tersebut merupakan bukti. Formulir-formulir ini dibagi menjadi formulir internal yaitu formulir yang dibuat oleh organisasi yang bersangkutan dan formulir eksternal yaitu formulir-formulir yang diterima dari luar organisasi.

c) Jurnal

Jurnal merupakan media/metode yang digunakan untuk mencatat transaksi keuangan secara kronologis (urut waktu). Jurnal disebut juga sebagai buku harian karena fungsi jurnal digunakan untuk melakukan pencatatan pertama dari transaksi-transaksi. Dalam jurnal transaksi keuangan diklasifikasikan menurut penggolongan yang sesuai dengan informasi yang akan disajikan dalam laporan keuangan.

d) Posting ke buku besar

Setelah dilakukan jurnal kemudian jumlah yang terdapat pada sisi debit dan kredit dipindahkan/ditransfer ke rekening buku besar yang sesuai. Tindakan transfer ini disebut posting. Buku besar adalah buku yang

berisi kumpulan rekening, Bertujuan mencatat secara terpisah atas pendapatan, belanja, pembiayaan, aktiva, hutang dan ekuitas dana.

e) Buku Besar Pembantu

Buku besar pembantu digunakan untuk mencatat untuk mencatat rincian rekening tertentu yang ada di buku besar. Rekening buku besar yang rinciannya dicatat dalam buku pembantu disebut rekening pengawas (*controlling accounts*) sedangkan rekening yang merinci rekening pengawas disebut rekening pembantu (*subsidiary accounts*) contoh buku pembantu piutang, buku pembantu persediaan, dan sebagainya.

f) Neraca Saldo

Neraca saldo merupakan daftar rekening-rekening beserta saldo yang menyertainya pada suatu periode tertentu.

g) Jurnal penyesuaian

Pendapatan dan biaya harus diakui pada periode akuntansi tertentu. pendapatan dianggap telah diperoleh kalau jasa itu telah diserahkan kepada konsumen meskipun kasnya belum diterima. sebaliknya, jika kas telah diterima sebelum jasa diserahkan kepada konsumen, maka penerimaan kas tidak boleh diakui sebagai pendapatan periode sekarang.

Jurnal penyesuaian dibuat untuk tujuan berikut :

- a) Melaporkan semua pendapatan yang diperoleh selama periode akuntansi

- b) Melaporkan semua biaya yang terjadi selama periode akuntansi
- c) Melaporkan dengan akurat nilai aktiva pada tanggal neraca, Sebagian nilai aktiva pada awal periode telah terpakai selama satu periode akuntansi yang dilaporkan pada tanggal neraca.
- d) Melaporkan secara akurat kewajiban (hutang) pada tanggal neraca, Dalam ini pembiayaan sebenarnya sudah terjadi tetapi belum bayar.

h) Neraca saldo setelah penyesuaian

Setelah jurnal peyesuaian dibuat, Langkah berikutnya adalah mempostingnya ke rekening buku besar yang berhubungan. Setelah dilakukan posting prosedur akuntansi berikutnya adalah menyusun neraca saldo setelah penyesuaian.

Neraca setelah saldo penyesuaian adalah neraca saldo yang disusun setelah pembuatan jurnal-jurnal penyesuaian. Saldo-saldo rekening yang ada dalam neraca saldo setelah penyesuaian adalah saldo rekening setelah disesuaikan.apabila dalam jurnal penyesuaian muncul rekening baru. Maka rekening baru ini juga dimasukkan dalam neraca saldo setelah penyesuaian. Dengan adanya jurnal penutup, Rekening yang tetap ada adalah rekening parmenen yaitu asset, hutang dan ekuitas dana.

Untuk menihlkan rekening pendapatan, belanja, dan pembiayaan digunakan sebagai berikut :

- a) Karena pendapatan terletak pada sisi kredit maka untuk menihlkananya harus didebit. Demikian halnya penerimaan pembiayaan

- b) Karena belanja terletak disisi debit maka untuk menihkannya harus dikredit, Demikian halnya pengeluaran pembiayaan.
- c) Selisih antara pendapatan, penerimaan pembiayaan, belanja dan pengeluaran pembiayaan merupakan silpa
- d) Karena APBD kita menganut surplus dan defisit maka posisi silpa kemungkinan debit dan kemungkinan debit dan kemungkinan kredit

Berdasarkan rumus tersebut jurnal penutup yang dibuat (Nuran Darise,2008:48)

Pendapatan	xxx	
Penerimaan Pembiayaan	xxx	
Silpa	xxx	
Belanja		xxx
Pengeluaran Pembiayaan		xxx
Silpa		xxx

- e) Laporan keuangan

Menurut Lyn M. Fraser dan Aileen Ormiston "Suatu laporan tahunan *corporate* terdiri dari 4 laporan keuangan pokok "yaitu:

- 1) Neraca meunjukkan posisi keuangan aktiva, utang, dan ekuitas pemegang saham suatu perusahaan pada tanggal tertentu, seperti pada akhir triwulan atau akhir tahun.

- 2) Laporan rugi laba menyajikan hasil usaha pendapatan, beban, laba atau rugi bersih dan laba atau rugi persaham untuk periode akuntansi tertentu.
  - 3) Laporan ekuitas pemegang saham merekonsiliasi saldo awal dan akhir semua akun yang ada dalam seksi ekuitas pemegang saham pada neraca. Beberapa perusahaan menyajikan laporan saldo lab, Seringkali dikombinasikan dengan laporan rugi laba yang merekonsiliasi saldo awal dan akhir akun saldo laba. Perusahaan-perusahaan yang memiliki format penyajian yang terakhir biasanya akan menyajikan laporan ekuitas pemegang saham sebagai pengungkapan dalam catatan kaki.
  - 4) Laporan arus kas memberikan informasi tentang arus kas masuk dan keluar dari kegiatan operasi, pendanaan, dan investasi selama suatu periode akuntansi.
- f) Neraca saldo setelah penutupan

Tahap akhir dari siklus akuntansi adalah penyusunan neraca saldo setelah penutupan. Neraca saldo setelah penutupan berisi saldo rekening-rekening jurnal penutup. Jurnal penutup dibuat karena pada dasarnya rekening-rekening pendapatan, belanja, dan pembayaran merupakan sub bagian dari rekening ekuitas dana, Sehingga pada akhir periode akuntansi atau akhir tahun anggaran saldo-saldonya akan ditransfer ke rekening ekuitas.

Rekening pendapatan, belanja, dan pembiayaan disebut rekening asset, hutang, dan ekuitas dana disebut rekening permanen (real) karena saldo rekening temporer dalam hal ini pendapatan, belanja, dan pembiayaan tidak berlanjut pada tahun berikutnya maka angka-angka rekening tersebut harus dinihilkan melalui jurnal penutup

### **2.2.6 Output yang dihasilkan**

Output yang dihasilkan dari Sistem Informasi Akuntansi Keuangan Daerah adalah:

1. Penganggaran
  - a. Rencana Kerja Anggaran (RKA);
  - b. Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA); dan
  - c. Surat Penyediaan Dana (SPD);
2. Penatausahaan
  - a. Surat Permintaan Pembayaran (SPP);
  - b. Surat Perintah Membayar (SPM);
  - c. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D);
  - d. Surat Tanda Setoran (STS);
  - e. Register; dan
  - f. Surat pengendalian lainnya.
3. Akuntansi dan Pelaporan
  - a. Jurnal;
  - b. Buku besar;
  - c. Buku pembantu;

- d. Laporan realisasi anggaran;
- e. Laporan arus kas; dan
- f. Neraca.

Program Aplikasi Sistem Informasi Akuntansi Keuangan Daerah didukung dengan :

- a. Buku manual sistem dan prosedur penganggaran;
- b. Buku manual sistem dan prosedur penatausahaan;
- c. Buku manual sistem dan prosedur akuntansi dan pelaporan; dan
- d. Buku pedoman pengoperasian aplikasi Sistem Informasi Akuntansi Keuangan Daerah

### **2.2.7 Teori Implementasi Kebijakan**

Implementasi kebijakan adalah “suatu proses dinamika yang mana meliputi interaksi banyak faktor”(Grizzle dan Pettijohn: 2002). Pendekatan yang digunakan dalam menganalisis implementasi Sistem Informasi Akuntansi Keuangan Daerah mengacu pada teori yang dikemukakan oleh George C.Edward III. Menurut Edward dalam Subarsono (2005:90) “implementasi kebijakan dipengaruhi oleh empat variabel yaitu komunikasi (Communications), Sumber daya (resource), Sikap (diposition) dan struktur birokrasi (bureucratic structure)”. Keempat variabel tersebut dilaksanakan secara simultan karena antara satu dengan yang lainnya hubungan yang erat.

#### **1. Komunikasi**

Implementasi akan berjalan efektif apabila ukuran-ukuran dan tujuan-tujuan kebijakan dipahami oleh individu-individu yang bertanggungjawab dalam

pencapaian tujuan kebijakan. Kejelasan ukuran dan tujuan kebijakan dengan demikian perlu dikomunikasikan secara tepat dengan para pelaksana. Konsistensi atau keseragaman dari ukuran dasar dan tujuan perlu dikomunikasikan sehingga implementor mengetahui secara tepat ukuran maupun tujuan kebijakan itu. Komunikasi dalam organisasi merupakan suatu proses yang amat kompleks dan rumit. Sumber informasi yang berbeda dapat melahirkan interpretasi yang berbeda pula. Agar implementasi berjalan efektif, siapa yang bertanggungjawab melaksanakan sebuah keputusan harus mengetahui apakah sebuah implementasi dapat terlaksana.

Sesungguhnya implementasi kebijakan harus diterima oleh semua personil dan harus mengerti secara jelas dan akurat mengenai maksud dan tujuan dari sebuah kebijakan. Jika para aktor pembuat kebijakan telah melihat ketidakjelasan spesifikasi kebijakan sebenarnya implementor tidak mengerti apa sesungguhnya yang akan diarahkan. Para implementor kebijakan akan bingung dengan apa yang akan dilakukan sehingga jika dipaksakan tidak akan mendapatkan hasil yang optimal.

## 2. Sumberdaya

Sumberdaya adalah faktor penting untuk implementasi kebijakan agar efektif. Komponen sumber daya meliputi jumlah staf, keahlian dari para pelaksana, informasi yang relevan, serta cukup untuk menerapkan kebijakan dan pemenuhan sumber sumber terkait dalam pelaksanaan kebijakan, adanya wewenang yang menjamin bahwa kebijakan dapat diarahkan sebagaimana yang diharapkan serta adanya fasilitas-fasilitas pendukung yang dapat dipakai untuk

melakukan kegiatan seperti dana dan sarana prasarana. Sumber daya manusia yang tidak memadai (Jumlah dan kemampuan) berakibat tidak dapat dilaksanakannya kebijakan secara sempurna serta tidak mampu melakukan pengawasan dengan baik. Jika jumlah staf pelaksana kebijakan terbatas, maka hal yang harus dilakukan adalah meningkatkan kemampuan/keterampilan para pelaksana untuk melakukan penerapan kebijakan. Untuk itu, perlu adanya manajemen SDM yang baik agar dapat meningkatkan kinerjanya. Informasi merupakan sumber daya lainnya yang penting bagi pelaksana kebijakan. Terdapat dua bentuk informasi, yaitu :

- a. Informasi mengenai bagaimana cara menyelesaikan kebijakan serta bagi pelaksana harus mengetahui tindakan apa yang harus dilakukan, dan
- b. Informasi tentang data pendukung kepada peraturan pemerintah dan undang-undang.

Selain SDM dan informasi, sumber daya lain yang juga penting adalah kewenangan untuk menentukan bagaimana kebijakan dilakukan, kewenangan untuk membelanjakan/mengatur keuangan, baik penyediaan uang, pengadaan staf, maupun pengadaan supervisor serta fasilitas fasilitas yang diperlukan untuk melaksanakan kebijakan seperti kantor, dan peralatan.

### 3. Disposisi atau sikap

Disposisi adalah watak atau karakteristik yang dimiliki oleh implemeentor, seperti komitmen, kejujuran, dan sifat demokrasi. Salah satu faktor yang mempengaruhi efektifitas implementasi kebijakan adalah sikap implementor.

Apabila implementor memiliki disposisi yang baik, maka sebuah kebijakan akan dapat dijalankan dengan baik seperti apa yang diinginkan oleh pembuat kebijakan. Ketika implementor memiliki sikap atau perspektif yang berbeda dengan pembuat kebijakan, maka proses implementasi kebijakan juga menjadi tidak efektif.

#### 4. Struktur Birokrasi

Struktur organisasi yang bertugas mengimplementasikan kebijakan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap implementasi kebijakan. Salah satu dari aspek struktur yang penting dari setiap organisasi adalah adanya prosedur operasi yang standar (standar operating procedures atau SOP). SOP menjadi pedoman bagi setiap implementor dalam bertindak. Struktur organisasi yang terlalu panjang akan cenderung melemahkan pengawasan dan menimbulkan red-tape, yakni prosedur birokrasi yang rumit dan kompleks serta menyebabkan aktivitas organisasi tidak fleksibel.

#### 2.2.8 Nilai-Nilai Pendukung Implementasi Kebijakan

Penerapan kebijakan harus didukung oleh nilai-nilai dari aparatur pelaksana kebijakan, sehingga penerapan kebijakan dapat berjalan efektif. Nilai-nilai pendukung yang hendaknya dimiliki oleh aparatur Dinas Perkebunan Provinsi Sulawesi Selatan sebagai aparatur pelaksana kebijakan adalah sebagai berikut :

##### 1. Integritas

Integritas dalam hal ini adalah berpikir, berkata, berperilaku, dan bertindak dengan baik dan benar serta memegang teguh kode etik dan prinsip-prinsip moral.

## 2. Profesionalisme

Profesionalisme berarti bekerja secara tuntas dan akurat atas dasar kompetensi terbaik dengan penuh tanggung jawab dan komitmen yang tinggi. Tanggung jawab dalam hal ini berkaitan erat dengan akuntabilitas. Akuntabilitas adalah kewajiban untuk memberikan pertanggung jawaban atau untuk menjawab dan menerangkan kinerja dan tindakan seseorang/pemimpin organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau kewenangan untuk meminta pertanggung jawaban atau keterangan. Melalui penerapan nilai akuntabilitas, maka suatu proses pengambilan keputusan atau kinerja dapat dimonitor, dinilai dan dikritisi.

## 3. Sinergi

Sinergi yaitu membangun dan memastikan hubungan kerja sama internal yang produktif serta kemitraan yang harmonis dengan para pemangku kepentingan, untuk menghasilkan karya yang bermanfaat dan berkualitas

## 4. Pelayanan

Memberikan layanan yang memenuhi kepuasan pemangku kepentingan yang dilakukan dengan sepenuh hati. Adapun indikatornya, antara lain :

- a. Tersedianya informasi yang memadai pada setiap proses penyusunan dan implementasi kebijakan
- b. Adanya akses pada informasi yang siap, mudah dijangkau, bebas diperoleh dan tepat waktu.

## 5. Kesempurnaan

Kesempurnaan dalam hal berkaitan dengan senantiasa melakukan upaya perbaikan disegala bidang untuk menjadi dan memberikan yang terbaik

### **2.2.9 Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah Menurut Peraturan Menteri dalam Negeri No 59 Tahun 2007**

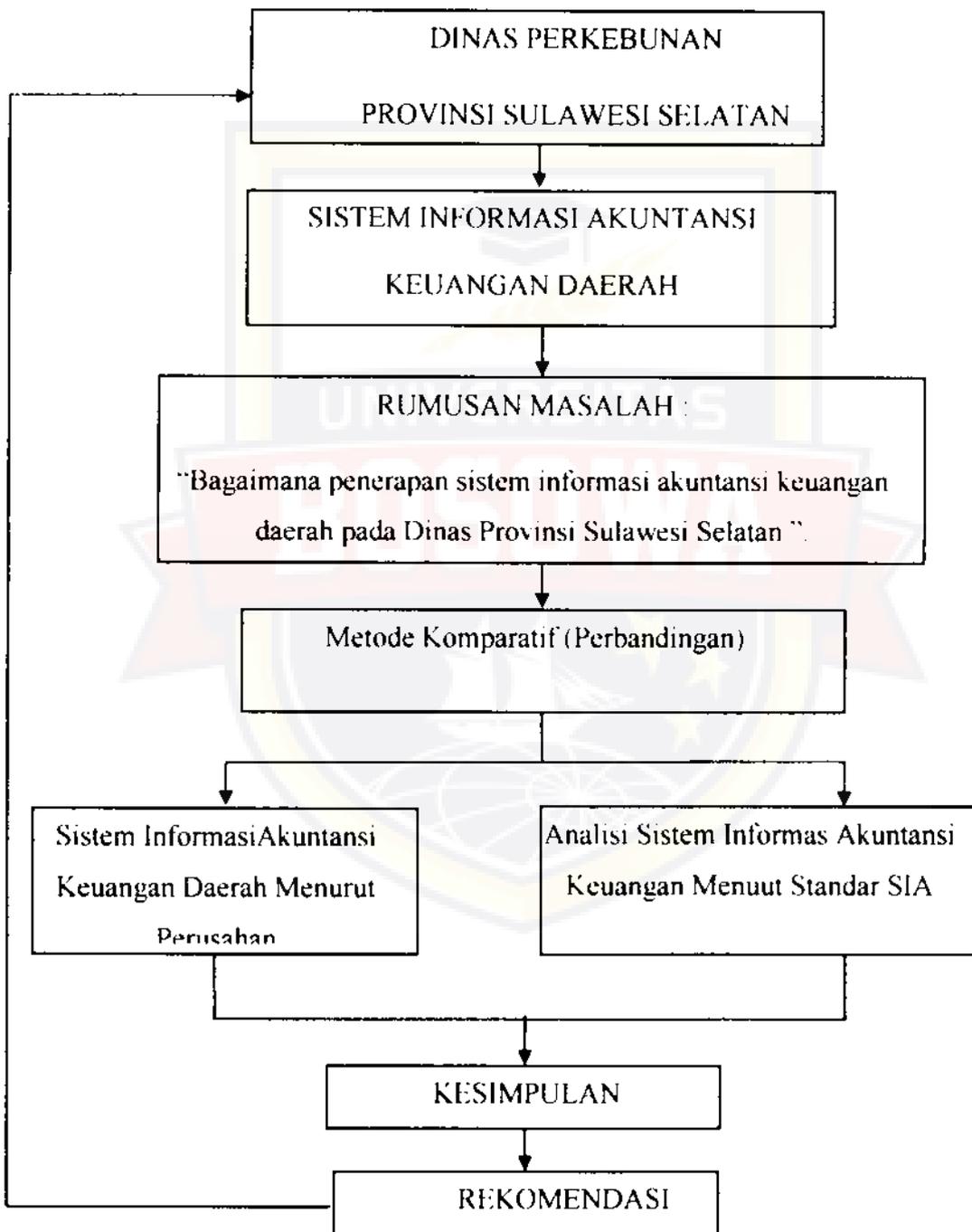
Sistem akuntansi pemerintah daerah ditetapkan dengan peraturan kepala daerah mengacu pada peraturan daerah tentang pokok-pokok pengelolaan keuangan daerah.

Menurut Permendagri Nomor 59 tahun 2007 pasal 232 ayat (3) sistem akuntansi pemerintah daerah meliputi serangkaian prosedur mulai dari proses pengumpulan data, pencatatan, pengikhtisaran, Sampai dengan pelaporan keuangan dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD yang akan dilakukan secara manual atau menggunakan aplikasi computer.

Menurut Permendagri No 59 Tahun 2007 Pasal 233 (1) sistem akuntansi pemerintah daerah sekurang-kurangnya meliputi prosedur akuntansi penerimaan jasa, prosedur akuntansi pengeluaran kas, prosedur akuntansi asset tetap/barang milik daerah dan prosedur akuntansi selain kas.

## 2.3 Kerangka Pikir

**Gambar 2.2**  
**Kerangka Pikir**



## 2.4 Hipotesis

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan, Maka hipotesis yang digunakan adalah “Diduga bahwa penerapan sistem informasi akuntansi pada dinas perkebunan provinsi Sulawesi Selatan belum efektif”



## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **3.1 Daerah dan Waktu Penelitian**

Penelitian ini dilakukan di Makassar pada Dinas Perkebunan Provinsi Sulawesi Penelitian dilakukan selama kurang lebih dua bulan yaitu dilaksanakan pada bulan Mei sampai dengan bulan Juni 2017.

#### **3.2 Metode Pengumpulan Data**

Untuk memperoleh informasi data yang baik dan tepat dengan asumsi agar sasaran penulisan dapat dicapai, Maka penulisan menggunakan metode pengumpulan data yaitu :

1. Observasi yaitu pengumpulan data yang dilakukan langsung ketempat penelitian dan mengumpulkan data yang diperlukan
2. Interview yaitu teknik yang dilakukan dengan proses tanya jawab kepada pimpinan dan karyawan yang ada pada perusahaan tersebut
3. Dokumentasi yaitu teknik pengumpulan data dengan cara melakukan analisis terhadap semua catatan dan dokumen, yang dimiliki oleh perusahaan. Hal ini dilakukan untuk memperoleh informasi mengenai data yang diperlukan.
4. Penelitian Kepustakaan (library Research) yaitu dengan cara membaca, mengumpulkan, mempelajari dan mencatat bahan-bahan yang berhubungan dengan penelitian yang didapat dari buku, artikel, jurnal maupun dari internet.

### **3.3 Jenis dan Sumber Data**

#### **3.3.1 Jenis Data**

Adapun jenis data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Data kualitatif yaitu data yang diperoleh dari pemerintahan dalam bentuk informasi baik lisan maupun tulisan seperti sejarah berdirinya kantor Dinas Perkebunan Provinsi Sul-Sel, Struktur organisasi serta data-data lain yang berhubungan dengan masalah penelitian.
2. Data kuantitatif yaitu berupa anggaran pendapatan dan belanja daerah dan laporan realisasi anggaran pemerintah daerah dinas perkebunan provinsi Sul-Sel tahun 2014-2015 serta data-data lain yang berhubungan dengan masalah penelitian.

#### **3.3.2 Sumber Data**

Adapun sumber data yang dikumpulkan oleh penulis dan dipergunakan dalam penulisan ini adalah :

1. Data primer mengenai proses penyusunan keuangan daerah, proses pengesahan keuangan daerah dan proses pelaksanaan keuangan daerah di Dinas Perkebunan provinsi Sul-Sel yang diperoleh dari hasil wawancara.
2. Data sekunder data berupa buku kas umum, buku kas pembantu penerimaan dan pengeluaran, laporan realisasi anggaran, catatan atas laporan keuangan, sejarah singkat pemerintah Dinas Perkebunan Provinsi Sul-Sel serta struktur organisasi.

### 3.4 Metode Analisa Data

Analisis data yang digunakan oleh penulis adalah metode komparatif, yaitu penelitian yang bersifat membandingkan. Penelitian ini dilakukan untuk membandingkan penerapan sistem informasi akuntansi di Dinas Perkebunan Provinsi Sul-Sel Dengan sistem informasi akuntansi menurut teori.

### 3.5 Definisi Operasional

Definisi operasional variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

1. Pengertian sistem adalah komponen-komponen yang erat berhubungan satu dengan yang lainnya, yang berfungsi bersama-sama untuk mencapai tujuan tertentu.
2. Pengertian informasi adalah data yang berguna yang diolah sehingga dapat dijadikan dasar untuk pengambilan keputusan yang tepat.
3. Pengertian akuntansi adalah proses mengidentifikasi, mengumpulkan, melaporkan informasi ekonomi, untuk memungkinkan adanya penilaian dan keputusan yang jelas dan tegas bagi mereka yang menggunakan informasi tersebut.
4. Pengertian keuangan daerah adalah segala sesuatu baik berupa uang maupun barang yang dapat dijadikan kekayaan daerah sepanjang belum dimiliki atau dikuasai oleh negara atau pihak lain sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

## BAB IV

### HASIL DAN PEMBAHASAN

#### 4.1 Gambaran Umum Perusahaan

##### 4.1.1 Sejarah Singkat kantor Dinas Perkebunan Provinsi Sulawesi Selatan

Pembangunan Sub Sektor Perkebunan di Sulawesi Selatan telah memperlihatkan peranan yang cukup berarti, hal ini ditandai dengan meningkatnya kontribusi terhadap Perekonomian Sulawesi Selatan, terutama peranannya terhadap ekspor. Keberhasilan dan kemajuan Pembangunan yang dapat dicapai tersebut merupakan implementasi dari Pola Pembangunan Perkebunan yang selama ini dilaksanakan dengan kegiatan Pokok Intensifikasi, Diversifikasi, Rehabilitasi dan Ekstensifikasi yang didukung dengan adanya kebijakan Pemerintah Daerah Sulawesi Selatan.

Secara nasional sub Sektor Perkebunan memberikan kontribusi peningkatan Devisa Negara dan PDRB terbesar di luar Minyak dan Gas Bumi serta penyerap tenaga kerja yang cukup besar. Sehubungan dengan Strategi dan Kebijakan Pembangunan Perkebunan Provinsi Sulawesi Selatan, maka Sasaran Pembangunan Perkebunan adalah peningkatan produksi dan produktivitas tanaman perkebunan berkelanjutan serta terbentuknya kawasan Agribisnis Perkebunan yang utuh disebut dengan Pusat Pengembangan Perkebunan di setiap lokasi Pengembangan dan Sentra-Sentra Produksi dengan azas kebersamaan ekonomi masyarakat/kerakyatan. Dengan demikian Petani Perkebunan sebagai anggota masyarakat melalui kelembagaan petani/assosiasi/ koperasi, mempunyai peluang untuk memanfaatkan potensi ekonomi baik dalam kegiatan "On Farm"



maupun pada kegiatan "Off Farm" seperti Pengolahan Hasil, Pemasaran dan lain-lain.

Dinas Perkebunan mempunyai tugas menyelenggarakan urusan di bidang perkebunan berdasarkan asas desentralisasi, dekonsentrasi dan tugas pembantuan.

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut Dinas Perkebunan mempunyai fungsi :

1. Perumusan kebijakan teknis dibidang perkebunan meliputi pengembangan dan pembinaan usaha perkebunan, sarana prasarana perkebunan, perlindungan perkebunan, dan pasca panen dan sistem informasi perkebunan
2. Penyelenggaraan pelayanan dalam bidang perkebunan yang meliputi pengembangan dan pembinaan usaha perkebunan, sarana prasarana perkebunan, perlindungan perkebunan dan pasca panen dan sistem informasi perkebunan
3. Pembinaan dan penyelenggaraan tugas dibidang perkebunan yang meliputi pengembangan dan pembinaan usaha perkebunan, sarana prasarana perkebunan, perlindungan perkebunan, dan pasca panen dan sistem informasi perkebunan
4. Penyelenggaraan tugas lain yang diberikan Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya.

## **4.2 Visi Dan Misi Pada Dinas Perkebunan Provinsi Sulawesi Selatan**

### **4.2.1 Visi**

Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perkebunan Provinsi Sulawesi Selatan dirumuskan Visi sebagai berikut :

Terwujudnya perkebunan maju, berbasis komoditi unggulan dalam mendukung Sulawesi Selatan sebagai pilar utama pembangunan nasional

### **4.2.2 Misi**

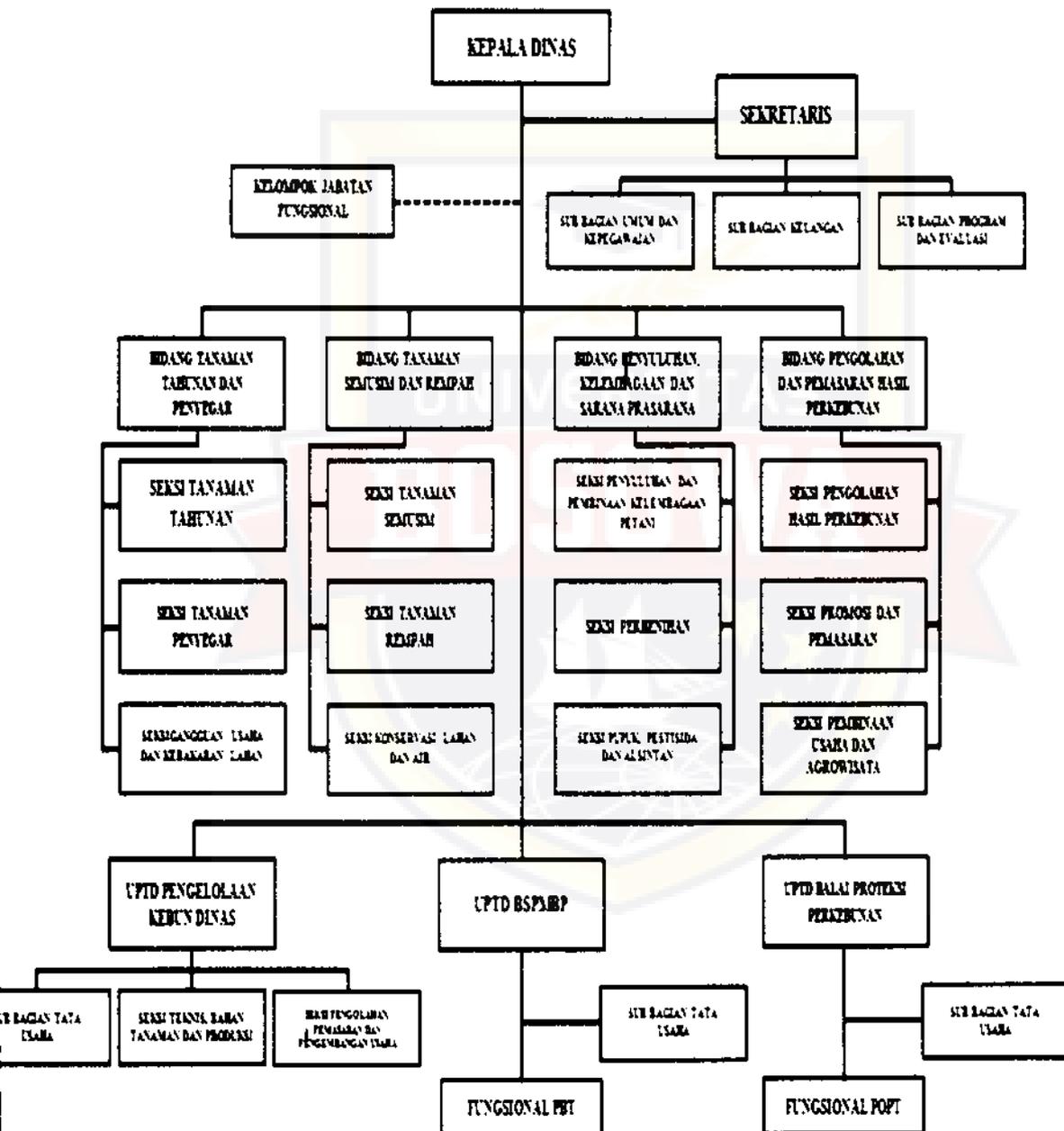
Misi Dinas Perkebunan Provinsi Sulawesi Selatan adalah :

1. Mengembangkan Perkebunan yang lebih produktif dan berkualitas melalui pemanfaatan potensi komoditi unggulan lokal.
2. Mendorong peningkatan nilai tambah produksi hasil perkebunan melalui pengembangan sarana pengolahan.

### **4.3 Struktur Organisasi**

Struktur organisasi adalah sebagai sarana untuk mencapai tujuan, dimana dalam struktur jelas menunjukkan pembagian tugas secara jelas menurut bagian-bagian, sehingga dalam pelaksanaan tugas sehari-hari berjalan sebagaimana mestinya. Untuk memiliki struktur organisasi Dinas Perkebunan Provinsi Sulawesi Selatan dapat dilihat pada skema berikut ini :

**Gambar 4.1**  
**Struktur Organisasi Dinas Perkebunan Provinsi Sulawesi Selatan**  
**Tahun 2017**



Sumber : Dinas Perkebunan provinsi Sulawesi Selatan, 2017

### **4.3.1 Tugas Pokok Masing-masing Bagian**

#### **1. Kepala Dinas**

Kepala Dinas memiliki tugas pokok memimpin, mengkoordinasikan, membina, mengendalikan, dan menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang pertanian sub urusan perkebunan, meliputi produksi perkebunan, sumber daya perkebunan, pengembangan dan perlindungan perkebunan serta pengolahan, pemasaran dan usaha perkebunan yang menjadi kewenangan provinsi, melaksanakan tugas dekonsentrasi sampai dengan dibentuk Sekretariat Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat serta melaksanakan tugas pembantuan sesuai bidang tugasnya, serta memiliki fungsi :

- a. Penyelenggaraan perumusan kebijakan teknis di bidang pertanian sub urusan perkebunan yang menjadi kewenangan provinsi,
- b. Penyelenggaraan koordinasi, pembinaan, pengendalian, dan memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan bidang pertanian sub urusan perkebunan yang menjadi kewenangan provinsi,
- c. Penyelenggaraan evaluasi dan pelaporan Dinas, dan
- d. Penyelenggaraan fungsi lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

#### **2. Sekretariat**

Sekretariat membawakan :

- a. Subbagian perencanaan dan pelaporan
- b. Subbagian keuangan dan asset , dan
- c. Subbagian kepegawaian dan umum.

#### **4. Bidang sumber daya perkebunan**

Bidang sumber daya perkebunan mempunyai tugas pokok menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanian sub urusan perkebunan aspek sumber daya perkebunan meliputi sumber daya manusia, kelembagaan, Bidang sumber daya perkebunan memiliki fungsi :

- a. penyelenggaraan pengkajian bahan kebijakan teknis di bidang sumber daya perkebunan
- b. penyelenggaraan pengembangan dan fasilitas sumber daya perkebunan
- c. penyelenggaraan evaluasi dan pelaporan bidang dan
- d. penyelenggaraan fungsi lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya

#### **5. Bidang pengembangan dan pengendalian perkebunan**

Menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanian sub urusan perkebunan aspek pengembangan dan perlindungan perkebunan meliputi penataan lahan, prasarana dan pengendalian perkebunan. Bidang pengembangan mempunyai fungsi :

- a. Penyelenggaraan pengkajian bahan kebijakan teknis di bidang pengembangan dan perlindungan perkebunan
- b. Penyelenggaraan fasilitas pengembangan dan perlindungan perkebunan
- c. Penyelenggaraan evaluasi dan pelaporan bidang dan
- d. Penyelenggaraan fungsi lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

## **6. Bidang Pengolahan, pemasaran dan usaha perkebunan**

Menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanian sub perkebunan aspek pengolahan , pemasaran dan usaha perkebunan, meliputi panen dan pengolahan, promosi dan pemasaran serta bina usaha. Bidang pengolahan, pemasaran dan usaha perkebunan mempunyai fungsi :

- a. penyelenggaraan pengkajian bahan kebijakan teknis di bidang pengolahan, pemasaran, dan usaha perkebunan
- b. penyelenggaraan fasilitas pengolahan, pemasaran dan usaha perkebunan
- c. penyelenggaraan evaluasi dan pelaporan bidang dan
- d. penyelenggaraan fungsi lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

## **7. UPTD Balai Proteksi Tanaman Perkebunan**

Melaksanakan urusan pemerintahan bidang pertanian sub perkebunan sesuai dengan urusan pemerintahan daerah di bidang proteksi tanaman perkebunan meliputi aspek sub bagian tata usaha , sarana teknologi pengendalian hama terpadu, dan pengembangan teknologi pengendalian hama terpadu, serta melaksanakan pelayanan public dan administrasi sesuai dengan tugas pokok dan fungsi balain yang menjadi kewenangan provinsi yaitu :

- a. Penyelenggaraan perumusan kebijakan teknis di bidang perlindungan tanaman perkebunan yang menjadi kewenangan provinsi
- b. Penyelenggaraan kebijakan teknis di bidang perlindungan tanaman perkebunan yang menjadi kewenangan provinsi
- c. Penyelenggaraan administrasi balai dan
- d. Penyelenggaraan fungsi lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

## 8. UPTD Balai Pengembangan Benih Tanaman Perkebunan

Balai pengembangan benih tanaman perkebunan mempunyai tugas pokok menyelenggarakan sebagian tugas teknis operasional/tugas penunjang di bidang pengembangan benih tanaman perkebunan, meliputi pengembangan teknologi perbenihan tanaman perkebunan, penerapan teknologi perbenihan, serta mengendalikan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi balai pengembangan benih tanaman perkebunan mempunyai fungsi :

- a. Penyelenggaraan penyusunan bahan kebijakan teknis pengembangan benih tanaman perkebunan.
- b. Penyelenggaraan pengembangan benih tanaman perkebunan meliputi pengembangan aspek teknologi perbenihan tanaman perkebunan dan penerapan teknologi perbenihan tanaman perkebunan
- c. Penyelenggaraan operasional administrasi balai, pengendalian, pemantauan, evaluasi dan pelaporan balai, dan
- d. Penyelenggaraan fungsi lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
- e. UPTD Balai sertifikat dan pengawasan Mutu Benih Tanaman Perkebunan

Melaksanakan urusan pemerintahan bidang pertanian sub urusan perkebunan yang menjadi kewenangan provinsi meliputi aspek sertifikasi benih dan pengawasan mutu benih tanaman perkebunan serta menyelenggarakan pelayanan administrasi dan pelayanan publik sesuai tugas pokok dan fungsi Balai. Mempunyai fungsi sebagai berikut :



Keuangan Daerah hanya dapat penulis jelaskan sebatas mengenai input dan outputnya saja, mengingat Sistem Informasi Akuntansi Keuangan Daerah merupakan sebuah aplikasi komputer yang memiliki komponen-komponen yang bekerja secara otomatis, dimana proses otomatisasi tersebut hanya dapat dijelaskan oleh

tenaga yang ahli dibidangnya.

Berikut ini hasil wawancara untuk menggambarkan proses pelaksanaan kerja Sistem Informasi Akuntansi Keuangan Daerah terkait mengenai proses penginputan data sampai dengan menghasilkan sebuah output adalah sebagai berikut :

PAA salah seorang staf/pegawai bagian anggaran mengungkapkan bahwa :

“Yah RKA merupakan laporan yang memuat tentang rencana pendapatan, belanja dan pembiayaan yang dibuat sebagai dasar pembuatan DPA setelah disetujui oleh DPR. RKA tadi merupakan input yang menjadi dasar pembuatan DPA.”

Selanjutnya staf tersebut juga mengungkapkan bahwa :

“Kalau RKA tadi berisi tentang rencana anggarannya, nah di DPA ini memuat tentang dasar pelaksanaan anggaran untuk pendapatan, belanja dan pembiayaannya, selanjutnya DPA ini sebagai dasar untuk dibuatkan SPD oleh BUD yang menyatakan tersedianya dana sebagai dasar pembuatan SPP atau surat permintaan pembayaran. Berarti input yang menjadi dasar pembuatan SPD adalah DPA, sedangkan SPD menjadi input pembuatan SPP.”

Salah seorang staf penatausahaan yang berinisial PAB juga mengungkapkan:

“Setelah surat permintaan pembayaran atau SPP diajukan oleh bendahara pengeluaran, kemudian diterbitkanlah SPM (output) berdasarkan SPP (input) tadi yang kemudian diajukan kepada kuasa BUD untuk penerbitan SP2D”

Penjelasan staf tersebut berlanjut pada wawancara berikut ini

“SP2D (output) atau surat perintah pencairan dana itu adalah dokumen yang digunakan sebagai dasar untuk pencairan dana dan diterbitkan oleh BUD berdasarkan SPM (input) atau surat perintah membayar.”

PAC salah seorang staf bagian akuntansi kemudian menjelaskan bahwa :

“ Bagian kami tinggal membuat jurnal dan laporan keuangan Jurnal (input) merupakan dasar pembuatan buku besar (output), sedangkan buku besar merupakan input yang

menjadi dasar pembuatan laporan keuangan seperti laporan arus kas, neraca dan laporan lainnya. Input dan output ini diolah secara otomatis oleh sistem, pekerjaan kita dimudahkan karena kita hanya bertugas untuk menginput data yang menjadi dasar pengolahan output yang diinginkan.”

Selanjutnya salah seorang staf lain yang berada pada bagian sama juga menambahkan bahwa :

“Disinilah peran Sistem Informasi Akuntansi Keuangan Daerah, bahwa Sistem Informasi Akuntansi Keuangan Daerah memudahkan dan mempercepat semua proses, kami tinggal menginput data ke dalam program dan kemudian terolah sendiri. Tetapi kami pun tetap harus berhati-hati karena kesalahan seringkali terjadi pada saat proses penginputan data.”

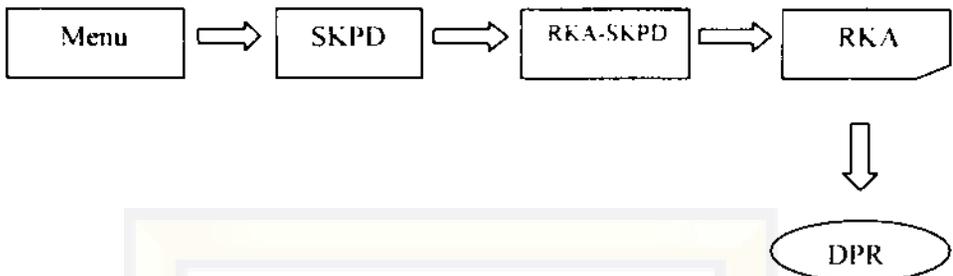
Ungkapan hasil wawancara di atas membuktikan bahwa pegawai Dinas Perkebunan provinsi Sulawesi Selatan telah memahami proses pelaksanaan Sistem Informasi Akuntansi Keuangan Daerah yang berkaitan dengan input dan output data yang dihasilkan. Hal tersebut menambah pengetahuan dan pemahaman pegawai mengenai makna dan proses pelaksanaan Sistem Informasi Akuntansi Keuangan Daerah secara umum.

Secara umum pegawai pada Dinas Perkebunan Provinsi Sulawesi Selatan telah mengetahui makna Sistem Informasi Akuntansi Keuangan Daerah, terlihat dari pemahaman mereka mengenai pengertian, manfaat dan tujuan serta input yang dibutuhkan dan output yang dihasilkan dari hasil pengolahannya. Hal tersebut tentunya memperkuat pemahaman mereka dalam memanfaatkan penerapan Sistem Informasi Akuntansi Keuangan Daerah.

Berikut ilustrasi gambar dari hasil wawancara yang peneliti berusaha gambarkan ke dalam sebuah flowchart sederhana berkaitan dengan pengolahan data dengan menggunakan Sistem Informasi Akuntansi Keuangan Daerah.

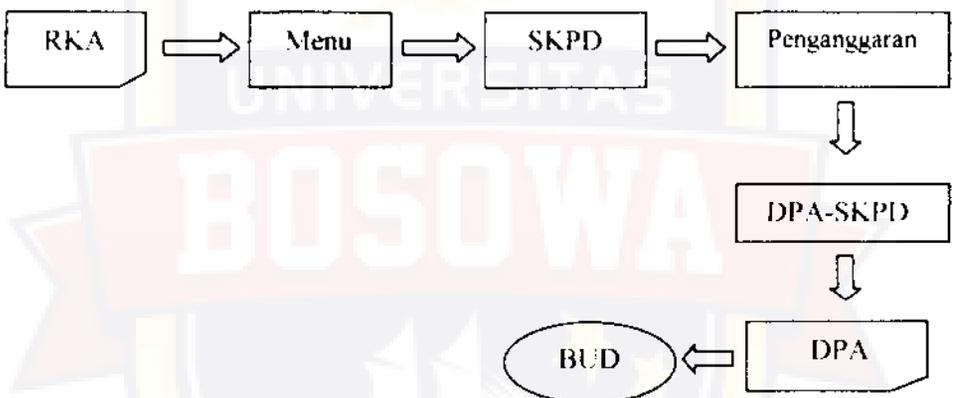
## 1. Bagian Anggaran

### a. Rencana Anggaran Kerja



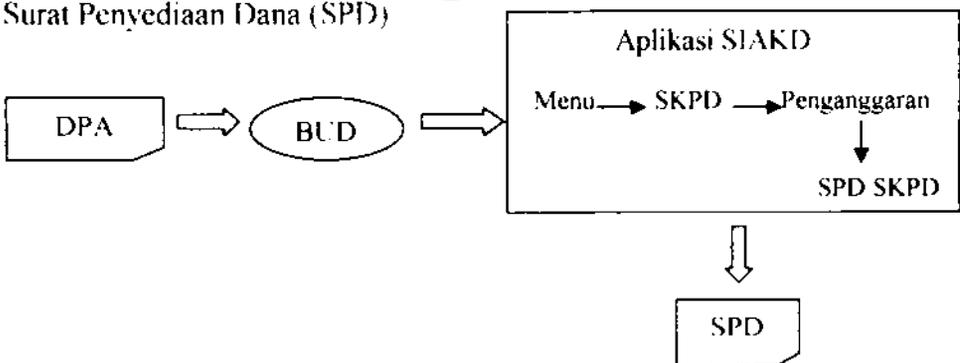
*Sumber : Dinas Perkebunan provinsi Sulawesi Selatan*

### b. Dokumen Pelaksana Anggaran (DPA)



*Sumber : Dinas Perkebunan provinsi Sulawesi Selatan*

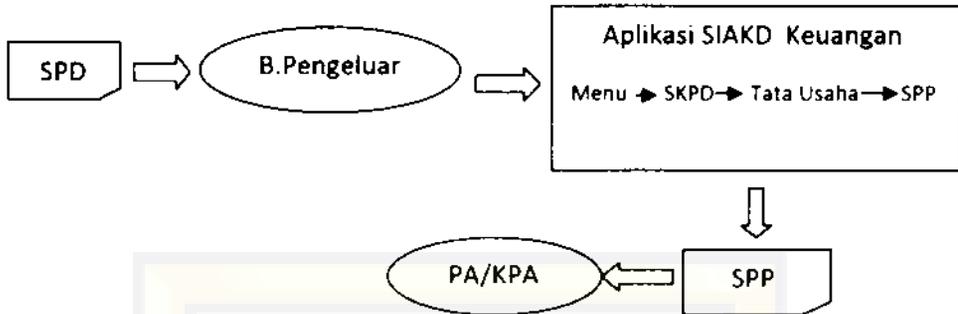
### c. Surat Penyediaan Dana (SPD)



*Sumber : Dinas Perkebunan provinsi Sulawesi Selatan*

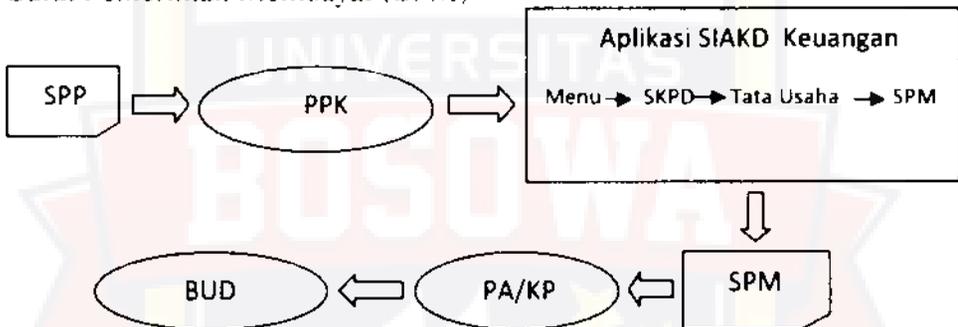
## 2. Bagian Penatausahaan

### a. Surat Permintaan Pembayaran (SPP)



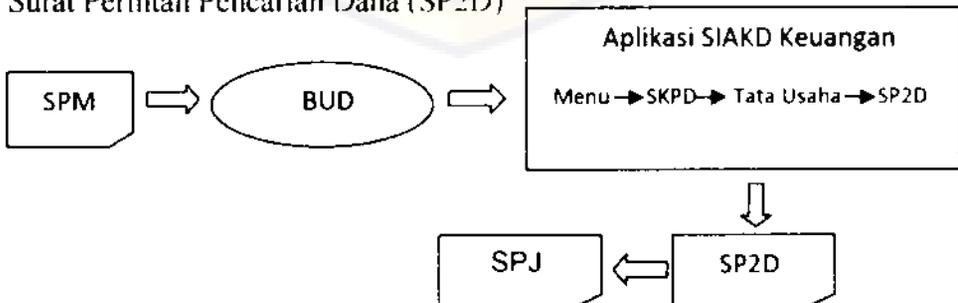
*Sumber : Dinas Perkebunan provinsi Sulawesi Selatan*

### b. Surat Pemerintah Membayar (SPM)



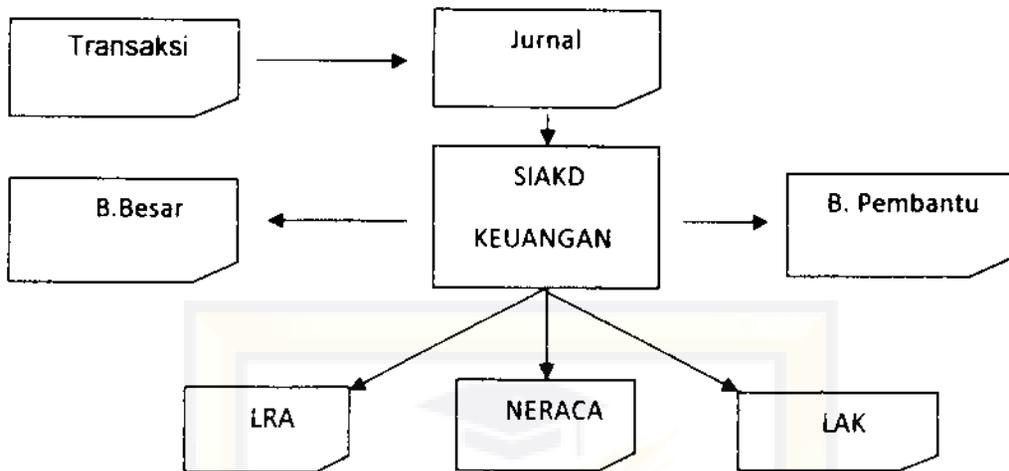
*Sumber : Dinas Perkebunan provinsi Sulawesi Selatan*

### c. Surat Perintah Pencarian Dana (SP2D)



*Sumber : Dinas Perkebunan provinsi Sulawesi Selatan*

### 3. Bidang Akuntansi dan Pelaporan



*Sumber : Dinas Perkebunan provinsi Sulawesi Selatan*

Ilustrasi gambar di atas menunjukkan gambaran pelaksanaan Sistem Informasi Akuntansi Keuangan Daerah pada Dinas Perkebunan Provinsi Sulawesi Selatan pada Sistem Informasi Akuntansi Keuangan Daerah bekerja secara terintegrasi yang terbagi ke dalam 3 bagian yaitu,

- a. bagian anggaran.
- b. Penatausahaan,
- c. akuntansi dan pelaporan

Setiap bagian bertanggungjawab atas tugasnya masing-masing, bagian anggaran bertanggungjawab untuk menyusun rencana kerja anggaran (RKA), dokumen pelaksana anggaran (DPA), serta surat penyedia dana (SPD). Bagian penatausahaan bertanggungjawab untuk menyusun surat perintah pembayaran (SPP), surat perintah membayar (SPM), surat perintah pencairan dana (SP2D) serta surat surat lainnya, sedangkan bagian akuntansi bertanggungjawab untuk menyusun laporan keuangan.

Laporan-laporan tersebut diproses secara otomatis dengan menggunakan Sistem Informasi Akuntansi Keuangan Daerah seperti yang terlihat pada flowchart di atas, setiap pegawai yang bertanggungjawab menyusun laporan hanya bertugas menginput data ke dalam sistem dan secara otomatis akan terolah sendiri sampai menghasilkan output yang diinginkan. Hal tersebut memudahkan tanggungjawab yang harus dikerjakan oleh para pegawai.

Seperti yang diungkapkan oleh salah seorang staf penatausahaan, PAB mengungkapkan bahwa, "yah jelas, sejak sistem tersebut diterapkan kami merasa sangat terbantuan dalam penyusunan RKA, DPA, dan SPD. Begitu pula dengan bagian-bagian lainnya, pekerjaan menjadi lebih mudah namun tetap memerlukan pengawasan"

#### **4.4.2 Faktor-Faktor Pendukung yang Dimiliki oleh Dinas Perkebunan Provinsi Sulawesi Selatan dalam Sistem Informasi Akuntansi Keuangan Daerah**

Penerapan Sistem Informasi Akuntansi Keuangan Daerah yang dilakukan oleh Dinas Perkebunan Provinsi Sulawesi Selatan tentunya tidak lepas dari prakondisi yang menjadi faktor pendukungnya. Dari hasil penelitian, berbagai faktor pendukung yang dimiliki untuk menerapkan Sistem Informasi Akuntansi Keuangan Daerah adalah sebagai berikut:

##### **1. Komunikasi**

Penerapan akan berjalan efektif apabila ukuran-ukuran dan tujuan-tujuan penerapan dipahami oleh individu yang bertanggung jawab dalam pencapaian

tujuan kebijakan, dalam hal ini kebijakan penerapan Sistem Informasi Akuntansi Keuangan Daerah. Kejelasan ukuran dan tujuan dengan demikian perlu dikomunikasikan secara tepat dengan para pelaksana. Komunikasi dalam bentuk sosialisasi pada Dinas Perkebunan Provinsi Sulawesi Selatan mengenai penerapan Sistem Informasi Akuntansi Keuangan Daerah cukup baik. Hal ini dapat dilihat dari hasil wawancara dengan PAB selaku staf bagian penatausahaan. Berikut kutipannya :

“Yah tentu dek, sebelum diterapkan sudah ada komunikasi dari atasan, kalau ada kebijakan baru yang akan diterapkan, termasuk aplikasi terbaru maka akan disosialisasikan terlebih dahulu oleh atasan. Tentang tujuan kebijakan atau manfaat penerapannya..”

Hal serupa juga dinyatakan oleh PAC, beliau mengatakan :

“Pasti sudah dikomunikasikan terlebih dahulu, baik dari atasan ke bawahan ataupun antara sesama pegawai. Tidak mungkin kita menerapkan tanpa ada komunikasi terlebih dahulu”

Wawancara di atas menunjukkan bahwa komunikasi telah aktif dilaksanakan. Hal tersebut tentunya tidak lepas dari keaktifan para pegawai untuk menggali sumber informasi yang memadai baik melalui diskusi ataupun tukar pikiran. Hal ini terungkap dalam wawancara dengan PAA, pegawai bagian anggaran. Beliau mengatakan bahwa:

“Sebenarnya dari dulu komunikasi dan sosialisasi tentang penerapan Sistem Informasi Akuntansi Keuangan Daerah Keuangan ini sudah ada, Cuma bertahap dan kadang-kadang secara tidak langsung, yah contohnya lewat diskusi sama kepala kantor dan pegawai yang bertugas pada bagian yang sama atau kadang-kadang juga sering bertukar pikiran tentang penerapan Sistem Informasi Akuntansi Keuangan Daerah itu.”

juga sering bertukar pikiran tentang penerapan Sistem Informasi Akuntansi Keuangan Daerah itu.. “ Informasi yang telah diuraikan di atas menunjukkan bahwa kebijakan yang kompleks membutuhkan kerja sama banyak orang. Unsur yang mungkin berpengaruh terhadap suatu organisasi dalam penerapan kebijakan diantaranya yaitu komunikasi yang cukup kepada para implementor

Penerapan kebijakan harus diterima oleh semua personil yang bersangkutan dan harus secara jelas serta akurat mengenai maksud dan tujuan dari kebijakan itu. Jika para implementor kebijakan bingung dengan apa yang akan dilakukan karena adanya ketidakjelasan informasi yang disebabkan kurangnya komunikasi, tentu saja jika dipaksakan maka tetap tidak akan mendapatkan hasil yang optimal. Hal ini sesuai dengan teori implementasi kebijakan menurut Edward III (1980) dimana komunikasi merupakan faktor penentu keberhasilan penerapan.

Berdasarkan analisis tersebut diatas, ditemukan bahwa untuk penerapan Sistem Informasi Akuntansi Keuangan Daerah yang optimal pada Dinas Perkebunan Provinsi Sulawesi Selatan didukung oleh adanya komunikasi atau sosialisasi yang aktif baik dari atasan kepada pegawai maupun antar pegawai.

## 2. Sumber Daya Manusia

Faktor penting lain yang merupakan penentu keberhasilan penerapan suatu kebijakan yaitu upaya pengembangan sumber daya manusia. Oleh karena itu berbagai upaya telah ditempuh oleh Dinas Perkebunan provinsi Sulawesi Selatan guna meningkatkan pemahaman dan pengetahuan SDM yang menjadi faktor pendukung pelaksanaan Sistem Informasi Akuntansi Keuangan Daerah. Hal ini tersirat dalam wawancara dengan PAB, yang mengatakan

“Salah satu langkah untuk meningkatkan kapasitas SDM disini khususnya dalam pengoperasian Sistem Informasi Akuntansi Keuangan Daerah, dilakukan pelatihan khusus atau diklat Sistem Informasi Akuntansi Keuangan Daerah yang diadakan oleh BPKP.”

Selain itu dalam wawancara dengan PAA, beliau mengatakan bahwa :

“Peningkatan SDM itu tidak hanya bisa dilakukan dengan pelatihanpelatihan. tapi bisa juga melalui curah pikir/diskusi yang lebih khusus tentang pengoperasian sistem ini.”

PAC yang merupakan staf bagian akuntansi dan pelaporan berpendapat bahwa keahlian yang dimiliki oleh SDM Dinas Perkebunan Provinsi Sulawesi Selatan sudah cukup memadai untuk mengoptimalkan penerapan Sistem Informasi Akuntansi Keuangan Daerah. Hal ini tersirat dalam wawancara dengan beliau yang menyatakan bahwa :

“ Saya kira SDM kantor ini sudah memadai untuk penerapan Sistem Informasi Akuntansi Keuangan Daerah ini, buktinya aplikasi ini mampu dikuasai dan digunakan sebagaimana mestinya, apa lagi sering juga diadakan diklat-diklat baik untuk bagian anggaran, penatausahaan maupun akuntansi dan pelaporan.”

Hasil wawancara diatas sejalan dengan pendapat Edward III, menurutnya keahlian dari para pelaksana menjadi salah satu komponen penting sumber daya untuk penerapan kebijakan, olehnya itu jika jumlah staf pelaksana kebijakan terbatas maka hal yang harus dilakukan yaitu meningkatkan kemampuan/keterampilan para pelaksana untuk menjalankan kebijakan. Sumber daya manusia yang tidak memadai (jumlah dan kemampuan) akan berakibat pada tidak dapat dilaksanakannya kebijakan secara sempurna karena mereka tidak bisa melakukan pengawasan dengan baik.

Berdasarkan hal tersebut diatas, maka diketahui bahwa ternyata dalam penerapan Sistem Informasi Akuntansi Keuangan Daerah pada Dinas Perkebunan Provinsi Sulawesi Selatan didukung oleh beberapa faktor dalam hal SDM nya, yaitu :

1. Sumber daya manusia yang memang handal/memenuhi baik dalam jumlah maupun kapasitasnya,

2. Untuk penerapan Sistem Informasi Akuntansi Keuangan Daerah, pegawai dibekali dengan pelatihan rutin, seperti pelatihan Sistem Informasi Akuntansi Keuangan Daerah, diklat dan sebagainya.
3. Adanya kesadaran para pegawai untuk meningkatkan kemampuan mereka dengan curah pikir/diskusi yang lebih khusus tentang penerapan.

### 3. Disposisi/Sikap

Salah satu faktor yang mempengaruhi efektifitas penerapan kebijakan adalah sikap implementor. Jika implementor setuju dengan isi dari kebijakan maka mereka akan melaksanakan dengan senang hati, tetapi jika pandangan mereka berbeda dengan pembuat kebijakan, maka proses penerapan akan mengalami banyak masalah (Edward III : 1980)

Dalam hal disposisi/sikap ini, ditemukan adanya respon yang baik dari para implementor karena mereka sadar bahwa penerapan Sistem Informasi Akuntansi Keuangan Daerah akan membawa dampak yang baik sehingga mereka setuju untuk menerapkan Sistem Informasi Akuntansi Keuangan Daerah. Hal tersebut terungkap dari wawancara dengan PAC, staf bagian akuntansi dan pelaporan yang mengatakan bahwa, "saya setuju dengan penerapan sistem ini, karena dapat mempercepat proses pelaporan keuangan."

Pendapat serupa juga dinyatakan oleh PAB, staf bagian penatausahaan. Dalam wawancaranya beliau mengatakan.

"Kalau pendapat pribadi saya, saya merespon baguslah penerapan sistem ini, karena sangat membantu kita dalam memproses seluruh transaksi keuangan pemerintah, lebih mengefektifkan waktu, pokoknya sangat membantu lah."

Tentunya penerapan Sistem Informasi Akuntansi Keuangan Daerah ini berjalan lebih baik karena didukung oleh peraturan dan pedoman khusus yang

2. Untuk penerapan Sistem Informasi Akuntansi Keuangan Daerah, pegawai dibekali dengan pelatihan rutin, seperti pelatihan Sistem Informasi Akuntansi Keuangan Daerah, diklat dan sebagainya,
3. Adanya kesadaran para pegawai untuk meningkatkan kemampuan mereka dengan curah pikir/diskusi yang lebih khusus tentang penerapan.

### 3. Disposisi/Sikap

Salah satu faktor yang mempengaruhi efektifitas penerapan kebijakan adalah sikap implementor. Jika implementor setuju dengan isi dari kebijakan maka mereka akan melaksanakan dengan senang hati, tetapi jika pandangan mereka berbeda dengan pembuat kebijakan, maka proses penerapan akan mengalami banyak masalah (Edward III : 1980)

Dalam hal disposisi/sikap ini, ditemukan adanya respon yang baik dari para implementor karena mereka sadar bahwa penerapan Sistem Informasi Akuntansi Keuangan Daerah akan membawa dampak yang baik sehingga mereka setuju untuk menerapkan Sistem Informasi Akuntansi Keuangan Daerah. Hal tersebut terungkap dari wawancara dengan PAC, staf bagian akuntansi dan pelaporan yang mengatakan bahwa, "saya setuju dengan penerapan sistem ini, karena dapat mempercepat proses pelaporan keuangan."

Pendapat serupa juga dinyatakan oleh PAB, staf bagian penatausahaan. Dalam wawancaranya beliau mengatakan.

"Kalau pendapat pribadi saya, saya merespon baguslah penerapan sistem ini, karena sangat membantu kita dalam memproses seluruh transaksi keuangan pemerintah, lebih mengefektifkan waktu, pokoknya sangat membantu lah."

Tentunya penerapan Sistem Informasi Akuntansi Keuangan Daerah ini berjalan lebih baik karena didukung oleh peraturan dan pedoman khusus yang

memadai. Hal ini dinyatakan oleh PAA, staf bagian anggaran Dinas Perkebunan Provinsi Sulawesi Selatan, “Ya.. setuju aja karena memang penerapannya berdasarkan peraturan khusus yaitu permendagri 13 dan pedoman yang mendukung penerapannya”

Wawancara di atas menunjukkan bahwa respon pegawai atas penerapan Sistem Informasi Akuntansi Keuangan Daerah di Dinas Perkebunan Provinsi Sulawesi Selatan cukup baik sehingga penerapannya dapat terlaksana dengan baik dan dilaksanakan dengan senang hati oleh setiap pegawai.

Ketika ditanyakan kepada Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Sulawesi Selatan mengenai pendapatnya tentang penerapan Sistem Informasi Akuntansi Keuangan Daerah, beliau pun sangat setuju. Dalam wawancaranya beliau mengatakan, “Saya sangat setuju dengan penerapan Sistem Informasi Keuangan Daerah ini, karena sangat membantu terutama dalam hal penyusunan dan penyajian laporan keuangan.”

Wawancara tersebut mengindikasikan bahwa dalam penerapan Sistem Informasi Akuntansi Keuangan Daerah pada Dinas Perkebunan Provinsi Sulawesi Selatan juga mendapatkan dukungan penuh dari Kadis, sehingga tidak heran jika para pegawai dapat menjalankannya secara optimal.

Disamping itu, untuk menjalankan kebijakan tersebut secara optimal, implementor juga perlu mengetahui alasan mengapa kebijakan tersebut dibuat. Ketika ditanyakan kepada PAC salah seorang staf akuntansi, staf tersebut mengungkapkan bahwa :

“Saya kira yang paling mengetahui alasan kebijakan tersebut diterapkan adalah para pembuat kebijakan, salah satunya adalah ibu kadis. Tapi menurut saya sendiri, alasan utama mengapa kebijakan ini perlu diterapkan adalah untuk memperbaiki sistem

pengelolaan keuangan pemerintah khususnya di Dinas Perkebunan Provinsi Sulawesi Selatan, yah dengan menerapkan kebijakan ini, secara tidak langsung sistem pengolahan keuangan kita meningkat karena adanya peralihan dari sistem manual ke komputerisasi.”

Ketika ditanyakan kepada kepala Dinas Perkebunan Provinsi Sulawesi

Selatan mengungkapkan bahwa :

“Kebijakan ini kan diatur dalam peraturan pemerintah, dimana kita berkewajiban untuk memanfaatkan kemajuan teknologi informasi Disini kita merasa perlu untuk mengembangkan dan memanfaatkan peraturan tersebut dalam rangka meningkatkan kemampuan pengelolaan keuangan kita.”

Berdasarkan analisis hasil wawancara di atas, maka dapat diketahui bahwa

selain sikap pegawai yang menerima dan mampu melaksanakan kebijakan dengan baik dan senang hati selaku implementor kebijakan, komitmen kepala kantor/pimpinan sebagai bentuk dukungan sangat dibutuhkan dalam mencapai optimalisasi penerapan Sistem Informasi Akuntansi Keuangan Daerah pada Dinas Perkebunan Provinsi Sulawesi Selatan. Hal tersebutlah yang menjadi nilai tambah yang dimiliki oleh Dinas Perkebunan Provinsi Sulawesi Selatan sehingga mereka mampu menerapkan kebijakan tersebut.

#### 4. Struktur Birokrasi

Struktur birokrasi adalah karakteristik, norma-norma dan pola-pola hubungan yang terjadi berulang-ulang dalam badan eksekutif yang mempunyai hubungan baik potensial maupun nyata dengan apa yang mereka miliki dalam menjalankan kebijakan. Kebijakan yang kompleks membutuhkan kerjasama banyak orang. Unsur yang mungkin berpengaruh terhadap suatu organisasi dalam penerapan kebijakan salah satunya adalah tingkat pengawasan hierarkis terhadap keputusan-keputusan sub unit dan proses-proses dalam badan pelaksana (Edward III: 1980)

Tingkat pengawasan hierarkis terhadap keputusan sub unit dan proses pelaksanaan penerapan Sistem Informasi Akuntansi Keuangan Daerah pada Dinas Perkebunan Provinsi Sulawesi Selatan sudah cukup baik. Hal tersebut terungkap dalam wawancara salah seorang administrator sekaligus penanggungjawab Sistem Informasi Akuntansi Keuangan Daerah pada Dinas Perkebunan Provinsi Sulawesi Selatan. Beliau mengatakan bahwa :

“Disini kita ada empat orang administrator atau penanggungjawab Sistem Informasi Akuntansi Keuangan Daerah, jadi kita bertugas untuk mengawasi jalannya penerapan sistem itu. Sejauh ini sistem tidak pernah bermasalah, karena sebelum terjadi kita telah melakukan antisipasi terlebih dahulu, contohnya kita ada server cadangan, jadi jika sistem mengalami masalah, server cadangan dapat digunakan. SKPD lain pun tidak pernah mengeluh dengan laporan-laporan kita. Itulah gunanya tim administrator sebagai penagawas sekaligus pegawai di kantor ini.”

Hasil wawancara di atas menunjukkan bahwa pengaruh struktur birokrasi khususnya dalam kaitannya dengan pengawasan atas penerapan Sistem Informasi Akuntansi Keuangan Daerah dapat dilihat dari penyajian laporan keuangan yang tidak pernah terhambat oleh Sistem Informasi Akuntansi Keuangan Daerah. Dengan adanya pengawasan yang baik dan perhatian khusus oleh tim administrator bentuk kegagalan yang disebabkan oleh sistem dapat diantisipasi, contohnya dengan pengadaan server cadangan. Hal tersebut membuktikan bahwa struktur birokrasi khususnya dalam hal pengawasan juga memegang peranan penting dalam mendukung penerapan Sistem Informasi Akuntansi Keuangan Daerah.

Selain faktor pendukung yang telah dijelaskan di atas, untuk menciptakan sebuah aransemen kebijakan yang ideal jika tidak didukung oleh nilai-nilai moral dan kapasitas pejabat yang baik maka kebijakan tersebut tidak akan berjalan dengan baik dan bermanfaat (Awan Setiawan, 2009). Dari hasil penelitian pada



Dinas Perkebunan Provinsi Sulawesi Selatan, ditemukan berbagai nilai-nilai yang dimiliki sehingga mampu menerapkan Sistem Informasi Akuntansi keuangan Daerah sebagai salah kebijakan dalam pengolahan keuangannya.

Dalam wawancara dengan PAB, salah satu staf bagian penatausahaan, beliau mengatakan bahwa :

“Untuk dapat memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat, Dinas Perkebunan Provinsi Sulawesi Selatan selalu berpegang pada nilai-nilai integritas, komitmen dan ketulusan. Nah, untuk menerapkan berbagai kebijakan baru khususnya dalam penerapan Sistem Informasi Akuntansi keuangan Daerah, tentunya nilai tersebut tidak hanya harus dipertahankan tetapi juga senantiasa ditingkatkan dengan didukung oleh sumber daya manusia yang professional, yang mahir dibidangnya masing-masing”

Selanjutnya staf tersebut mengungkapkan bahwa

1. Integritas

“Perlu adanya integritas yang tinggi dek, jika integritas tidak dijunjung tinggi maka yang namanya penyelewengan dan penyalahgunaan mudah terjadi”

2. Komitmen

“Sedangkan komitmen berpengaruh dalam hal profesionalisme atas pekerjaan yang menjadi tanggung jawab kita. Misalnya, sistem yang kita gunakan untuk mengolah data keuangan adalah sistem komputerisasi Sistem Informasi Akuntansi Keuangan Daerah, maka kita harus komitmen dengan kebijakan yang telah ditetapkan, jangan setiap tahun diadakan pergantian apalagi tanpa alasan yang jelas. Kalau seenaknya diganti, itu namanya tidak professional dong”

3. Ketulusan

“Ketulusan dibutuhkan untuk menjalankan sebuah pekerjaan, percuma mengerjakan sesuatu kalau tidak tulus apalagi jika menguntungkan karena hasilnya cenderung tidak maksimal. Untuk menerapkan kebijakan yang baru, dibutuhkan sebuah kesungguhan dan ketekunan. Jika ketulusan untuk mengerjakan sesuatu itu tidak ada, maka kita tidak bisa sungguh-sungguh dan tekun untuk bekerja. Jadi ketulusan itu perlu bukan hanya dalam penerapan Sistem Informasi Akuntansi Keuangan Daerah ini, tapi untuk menjalankan pekerjaan dan kebijakan lain yang diterapkan”

Pendapat tersebut di atas hampir senada dengan yang diungkapkan oleh PAC salah seorang staf akuntansi. Staf tersebut berpendapat bahwa nilai-nilai yang seharusnya dianut adalah integritas, komitmen, ketulusan, serta profesionalisme.

Hal tersebut tercermin dari hasil wawancara berikut :

“kita selalu berpegang pada integritas, komitmen dan ketulusan, menurut saya itu yang paling penting dijaga oleh setiap pegawai disini karena nilai-nilai itu yang menjadi ciri tersendiri dari Dinas Perkebunan Provinsi Sulawesi Selatan

1. Integritas

“integritas seorang pegawai berpengaruh terhadap pencapaian tujuan yang maksimal, jadi kalau pegawai bekerja dengan baik sesuai dengan aturan-aturan yang berlaku seperti pedoman yang mengatur tentang pengoperasian Sistem Informasi Akuntansi

Keuangan Daerah maka akan lebih gampang meraih apa yang akan dituju dari penerapan tersebut”

2. Komitmen

“selanjutnya harus komitmen, kalau sudah yakin menerapkan Sistem Informasi Akuntansi Keuangan Daerah dalam penyusunan laporan keuangan, maka kita perlu berkomitmen untuk itu. Jika kantor ini sudah mengambil keputusan untuk menerapkan Sistem Informasi Akuntansi Keuangan Daerah, maka untuk tahun-tahun kedepannya kita harus komitmen untuk tetap menggunakan sistem ini. Kembali lagi sama SDM nya, apakah sudah siap betul, kalau belum siap lantas diterapkan kan sama saja, bisa-bisa penerapannya asal-asalan. Itulah gunanya pelatihan, sosialisasi, diklat seperti yang sering dilakukan pegawai disini.

3. Ketulusan

“asal kita tulus untuk menjalankan sesuatu pasti selalu ada jalan untuk mencapainya, jika kita tulus menjalankan sesuatu pastinya kita semangat untuk mengerjakan agar apa yang mau dicapai bisa tercapai.”

Wawancara di atas diketahui bahwa nilai integritas diperlukan dalam pencapaian tujuan yang maksimal karena dengan menanamkan nilai integritas, pegawai bekerja dengan baik sesuai dengan aturan aturan yang berlaku sehingga tindakan-tindakan seperti penyalahgunaan dapat dihindari. Hal tersebut sesuai dengan defenisi dari integritas yakni berfikir, berkata, berperilaku, dan bertindak dengan baik dan benar serta emegang teguh kepada kode etik dan prinsip-prinsip moral. Selain itu juga diperlukan adanya komitmen dari pegawai sebagai aparat pelaksana kebijakan yang berpengaruh dalam menciptakan profesionalisme atas pekerjaan yang menjadi tanggung jawab mereka. sedangkan nilai ketulusan penting untuk menunjang profesionalisme dalam melaksanakan pekerjaan

Menurut PAA salah seorang staf anggaran, profesionalisme dalam bekerja adalah hal yang paling penting. Hal tersebut tersirat dari hasil wawancara sebagai berikut.

“Kalau orang yang menjalankan kebijakan tidak profesional, maka akan sulit untuk menerima dan menerapkan kebijakan baru dengan baik. Kantor ini selalu menempatkan orang-orang yang berkompeten untuk menjalankan tugas tertentu yaitu orang-orang yang sebelum penerapan telah mendapatkan bekal terlebih dahulu lewat pelatihan-pelatihan dan sosialisasi dan sampai sekarang masih terus mendapatkan pelatihan untuk penyesuaian apabila terdapat perbaharuan terhadap sistem yang sama dalam rangka meningkatkan profesionalisme.”

Hasil wawancara tersebut sejalan dengan defenisi profesionalisme yang berarti bekerja tuntas dan akurat atas dasar kompetensi terbaik dengan penuh tanggung jawab dan komitmen yang tinggi. Ungkapan hasil wawancara di atas menunjukkan bahwa profesionalisme merupakan hal yang terpenting. Dinas Perkebunan Provinsi Sulawesi Selatan telah menganut nilai tersebut yang tercermin dengan keputusan untuk menempatkan orang-orang dengan kemampuan terbaik/berkompeten serta memberikan pelatihan-pelatihan sesuai dengan tugasnya masing-masing dalam rangka meningkatkan nilai profesionalisme.

Ketika ditanyakan kepada kepala kantor Dinas Perkebunan Provinsi Sulawesi Selatan mengenai pendapatnya tentang nilai-nilai yang dimiliki Dinas Perkebunan Provinsi Sulawesi Selatan sehingga mampu menerapkan Sistem Informasi Akuntansi Keuangan Daerah, kadis Dinas Perkebunan Provinsi Sulawesi Selatan sepakat dengan pentingnya menanamkan nilai sinergi serta melakukan perbaikan di segala bidang untuk memberikan yang terbaik kepada pihak-pihak yang berkepentingan. Berikut ungkapannya :

“Membangun hubungan kerja sama yang baik dengan pihak internal maupun eksternal juga mampu menunjang efektifitas dan kualitas atas pelayanan yang diberikan, apalagi kalau dibarengi dengan perbaikan-perbaikan pada bidang-bidang yang perlu untuk disempurnakan. Misalnya, penerapan Sistem Informasi Akuntansi Keuangan Daerah merupakan salah satu bentuk penyempurnaan dibidang pengelolaan data keuangan dengan harapan agar dapat meningkatkan pengelolaan data keuangan.”

Selanjutnya beliau menambahkan :

“yang terpenting adalah kita mau untuk terus melakukan perbaikan-perbaikan untuk mencapai hasil semaksimal mungkin sesuai dengan yang diharapkan.”

Wawancara tersebut di atas dapat diketahui bahwa selain nilai profesionalisme, juga dibutuhkan sinergi untuk menunjang efektifitas dan kualitas pekerjaan. Hal tersebut sesuai dengan defenisi nilai sinergi yaitu membangun dan

memastikan hubungan kerjasama yang produktif serta kemitraan yang harmonis dengan para pemangku kepentingan, untuk menghasilkan karya yang bermanfaat dan berkualitas. Selain itu juga ditemukan nilai kesempurnaan, dalam hal ini berkaitan dengan senantiasa melakukan upaya perbaikan di segala bidang untuk menjadi dan memberikan yang terbaik, sehingga mampu menerapkan Sistem Informasi Akuntansi Keuangan Daerah.

Berdasarkan hasil analisis tersebut ditemukan bahwa untuk melaksanakan sebuah pekerjaan serta untuk penerapan Sistem Informasi Akuntansi Keuangan Daerah yang optimal pada Dinas Perkebunan Provinsi Sulawesi Selatan, terdapat nilai-nilai yang dianut dan senantiasa terus ditingkatkan antara lain nilai integritas, nilai profesionalisme, komitmen, nilai ketulusan, nilai sinergi serta nilai kesempurnaan.

#### **4.4.3 Kualitas Informasi yang Dihasilkan dari Penerapan Sistem Informasi Akuntansi Keuangan Daerah**

Bagaimanapun idealnya sebuah aransemen kebijakan, jika output yang dihasilkan dari sebuah penerapan tidak sesuai dengan manfaat yang diharapkan maka kebijakan tersebut tidak akan berjalan dengan baik dan dapat dianggap gagal. Dari hasil penelitian pada Dinas Perkebunan Provinsi Sulawesi Selatan, ditemukan berbagai beberapa karakteristik kualitas informasi yang dihasilkan dari penerapan Sistem Informasi Akuntansi Keuangan Daerah. Untuk menjawab rumusan masalah ketiga ini, peneliti memilih hanya mewawancarai staf bagian akuntansi dan pelaporan karena peneliti menganggap mereka yang paling

mengerti. Dalam wawancara dengan PAC, salah seorang staf akuntansi dan pelaporan. Beliau mengatakan bahwa:

1. Ketepatan waktu

Setelah diterapkannya Sistem Informasi Akuntansi Keuangan Daerah ini, setiap staf yang bertanggung jawab untuk menyajikan laporan keuangan menjadi termotivasi atau tidak malas untuk melaksanakan tugasnya masing-masing, itu karena apa dek ? karena mereka merasa terbantu dengan adanya sistem ini, dan penyajian laporan akhirnya tidak pernah terlambat sejak diterapkannya sistem ini, yah sampai sejauh ini juga sistem ini Alhamdulillah tidak pernah mengalami masalah, sehingga penyajian laporan keuangan tidak pernah terlambat, saya kira seperti itu.

2. Akurasi

yahhh.. sejauh ini tidak pernah ada keluhan dari SKPD lain tentang sistem ini, ekspor-import data juga lancar-lancar saja, itu kan berarti laporan kita tidak bermasalah

3. relevan

Sudah jelas dong dek, setiap transaksi dikelompokkan menurut jenisnya masing-masing, dan itu sudah terprogram langsung dalam sistem ini, kita hanya menginput data kedalam sistem, dan sistem yang mengolahnya.....klo sistem tidak saling berhubungan, yah berarti sistemnya gagal dong.”

Hasil wawancara tersebut sejalan dengan defenisi kualitas informasi dari ketiga karakteristik diatas yang berarti tepat waktu, saling berhubungan, dan dapat diandalkan. Ungkapan hasil wawancara diatas menunjukkan bahwa tingkat kualitas informasi yang dihasilkan dari penerapan Sistem Informasi Akuntansi Keuangan Daerah pada Dinas Perkebunan Provinsi Sulawesi Selatan sudah cukup baik. Tertundanya penyajian laporan keuangan yang diakibatkan oleh kegagalan sistem hampir tidak pernah terjadi, justru pegawai menjadi termotivasi dengan adanya sistem ini karena sangat membantu dalam proses penyajian laporan keuangan. Setiap bagian dalam sistem bekerja saling secara integritas dan saling berhubungan satu sama lain, setiap transaksi dikelompokkan secara otomatis menurut jenisnya masing-masing oleh sistem, sehingga pegawai hanya bertugas untuk menginput data ke dalam sistem. Setiap laporan yang ditansfer ke SKPD lain tidak pernah mengalami keluhan semenjak diterapkannya sistem ini, hal ini membuktikan bahwa sistem ini telah bekerja dengan baik.

#### **4.4.4 Penerapan Sistem Informasi Akuntansi Dalam Pengolahan Data Keuangan Daerah Dinas Perkebunan Provinsi Sulawesi Selatan**

Sistem pengolahan keuangan pemerintah daerah khususnya di dinas perkebunan provinsi Selatan mencakup kegiatan penganggaran, penatausahaan keuangan (Prosedur tata usaha keuangan penerimaan /pengeluaran kas), dan pelaporan atau prosedur akuntansi. Sementara itu pada SKPD dinas perkebunan provinsi sulawesi selatan nganjuk prosedur yang caup sistem informasi akuntansi keuang an daerah meliputi : (RKA, DPA), prosedur pada PPK-SKPD (verifikasi, perbedaharaan, dan akuntansi) prosedur bendahara pengeluaran, dan prosedur bendahara penerimaan.

Berikut adalah uraian prosedur pengelolaan keuangan dengan sistem informas akntansi keuangan daerah :

##### **1. Prosedur Penganggaran**

Prosedur penganggaran taha awal dalam pengolahan data keuangan, prosedur ini membentuk suatu *database* anggaran kinerja/program/kegiatan SKD atau SKPKD selama satu tahun. Di tingkat SKPD prosedur penganggaran dalam sistem informasi akuntansi keuangan daerah mencakup

- a. Penyusunan RKA
- b. Penyusunan Anggaran Kas
- c. Prosedur DPA

##### **2. Prosedur Penatausahaan Penerimaan Kas**

Prosedur penatausahaan Bendahara penerimaan merupakan posedur yang digunakan untuk enatausahakan kegiatan menerima, menyimpan, menyoter,

membayar, menyerahkan dan mempertanggungjawabkan penerimaan uang yang berada dalam pengelolaan bendahara penerimaan. Untuk melakukan prosedur penatausahaan bendahara penerimaan melalui sistem informasi akuntansi keuangan daerah, terdapat dua prosedur yaitu prosedur penginputan bukti penerimaan dan prosedur peninputan surat tanda setor ( STS)

### 3. Prosedur Pengelolaan Pengeluaran Kas

Langkah pertama prosedur penatausahaan pengeluaran kas adalah penerbitan SPD ( Surat Penyediaan Dana) , dokumen kesediaan dana untuk melaksanakan kegiatan sebagai dasar penerbitan surat permintaan pembayaran ( SPP), oleh PPKD ( pejabat pengelola keuangan daerah ) melalui BUD ( Bendahara Umum Daerah ) dan tidak dilakukan oleh operator sistem informasi akuntansi keuangan daerah SKPD. Pembuatan SPD dilaksanakan dengan membuat rencana penggunaan dana sampai ke rekening rincian objek.

Terdapat lima jenis pembayaran dalam sistem informasi akuntansi keuangan daerah yaitu uang persediaan, ganti uang persediaan, tambah uangan persediaan, langsung, dan nihil. Dalam sistem informasi akuntansi keuangan daerah prosedur penatausahaan pengeluaran kas meliputi penatausahaan sebagai berikut :

- a. Pembuatan SPP dan verifikasi SPP
- b. Penerbitan SPM dan verifikasi SPM
- c. Penerbitan SP2D
- d. Pemberian panjar, SPJ Panjar, dan pengambilan panjar.
- e. Pemuatan SPJ dan Pengesahan SPJ

f. Penerimaan dan penyetoran pajak

#### 4. Prosedur Akuntansi dan Pelaporan

Prosedur akuntansi dalam Sistem Informasi Akuntansi Keuangan Daerah meliputi tiga hal yaitu: input saldo awal, input data transaksi, dan koreksi/penyesuaian. Sementara prosedur pelaporan dimaksudkan untuk pengiriman database keuangan yang telah tersimpan dalam aplikasi Sistem Informasi Akuntansi Keuangan Daerah.

#### 5. Pengendalian Intern sistem informasi Keuangan daerah

Dalam Pengolahan Data Keuangan Suatu pengolahan data keuangan berbasis pengolahan data elektronik memerlukan suatu pengendalian intern yang dimaksudkan untuk memastikan bahwa sistem yang telah dirancang bisa mencapai efisiensi dan efektifitas pengelolaan dan pelaporan keuangan. Terdapat beberapa jenis pengendalian intern yang diterapkan dalam pengelolaan data keuangan melalui sistem informasi Keuangan daerah. Yang pertama adalah pengendalian akses dan wewenang user, hal ini memungkinkan sistem informasi Keuangan daerah yang ditujukan hanya kepada pihak tertentu seperti operator sistem informasi akuntansi Keuangan daerah. Para operator yang merupakan bendahara pengeluaran pembantu setiap bidang dibekali account akses dan password sendiri.

Pengendalian internal yang terakhir adalah pengendalian aplikasi yakni pengendalian khusus yang didesain untuk memastikan bahwa sistem yang diaplikasikan telah berjalan sesuai yang diharapkan. Tujuannya untuk menjamin bahwa seluruh transaksi yang diproses dalam sistem informasi

akuntansiKeuangan daerah merupakan transaksi yang valid, terotorisasi dan dicatat secara lengkap, akurat dan benar. Pengendalian aplikasi dikategorikan menjadi pengendalian masukan, pengendalian proses, dan pengendalian output.

a. Pengendalian Masukan

Pengendalian ini dirancang untuk mencegah atau mendeteksi kekeliruan dalam tahap masukan pengolahan data. Pengendalian ini meliputi berbagai hal seperti otorisasi transaksi, validasi, akurasi dan kelengkapan data.

b. Pengendalian Proses

Pengendalian proses dirancang untuk memastikan apakah proses pengolahan data keuangan melalui sistem informasi akuntansi Keuangan daerah telah dilakukan secara benar. Pengendalian ini pada dasarnya telah terintegrasi dengan pemrograman pada sistem informasi akuntansi Keuangan daerah seperti fungsi penolakan otomatis terhadap transaksi yang tidak sesuai dengan jenis transaksinya, fungsi koreksi bila terjadi kesalahan penginputan.

c. Pengendalian Output

Pengendalian output dirancang untuk memastikan bahwa output yang telah diproses oleh sistem informasi akuntansi keuangan daerah Keuangan merupakan output yang benar, sah, dan didistribusikan kepada pengguna laporan yang tepat. Pengendalian output dalam sistem informasi akuntansi Keuangan daerah.

## **BAB V**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **5.1 Kesimpulan**

Berdasarkan dari hasil analisis terhadap kondisi yang dijumpai dalam penelitian seperti dibahas dalam bab sebelumnya maka kesimpulan yang dapat ditarik dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Secara umum pegawai di dinas Perkebunan Provinsi Sulawesi Selatan sudah memahami makna Sistem Informasi Akuntansi Keuangan Daerah (SIAKD) Keuangan secara umum, yaitu sistem komputerisasi akuntansi yang diperuntukkan untuk pemerintah daerah untuk mengelola laporan keuangan pemerintah daerah.
2. Sistem Informasi Akuntansi Keuangan Daerah terbagi atas tiga bagian, yaitu bagian penatausahaan, bagian penganggaran, bagian akuntansi dan pelaporan. Dimana setiap bagian berkerja secara terintegrasi dan saling berhubungan satu sama lainnya.
3. Sistem Informasi Akuntansi Keuangan Daerah memudahkan proses penyusunan laporan keuangan, pegawai tinggal mencatat/menginput data pada sistem, selanjutnya proses pengklasifikasian, pengikhtisaran hingga akhirnya terbentuk laporan keuangan dikerjakan secara otomatis oleh sistem.
4. Output yang dihasilkan Sistem Informasi Akuntansi Keuangan Daerah yaitu Rencana Kerja Anggaran (RKA), Dokumen Pelaksana Anggaran (DPA), Surat Penyediaan Dana (SPD) untuk bagian penganggaran. Surat

Permintaan Pembayaran (SPP), Surat Perintah Membayar (SPM), Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D), Surat Pertanggungjawaban (SPJ) untuk bagian penatausahaan. Dan jurnal, buku besar, buku pembantu, laporan realisasi anggaran, laporan arus kas dan neraca untuk bagian akuntansi dan pelaporan.

5. Output yang dihasilkan oleh Sistem Informasi Akuntansi Keuangan Daerah sesuai dengan elemen laporan keuangan yang diatur dalam Permendagri 13 tahun 2006.
6. Faktor-faktor pendukung yang dimiliki oleh Dinas Perkebunan Provinsi Sulawesi Selatan untuk menerapkan Sistem Informasi Akuntansi Keuangan Daerah secara optimal, antara lain :
  - a. Komunikasi aktif. Untuk penerapan Sistem Informasi Akuntansi Keuangan Daerah yang optimal pada Dinas Perkebunan Provinsi Sulawesi Selatan didukung oleh adanya komunikasi atau sosialisasi yang aktif mengenai tujuan penerapan atau manfaat dari penerapan sistem tersebut. Komunikasi dilakukan baik dari atasan kepada pegawai maupun antar sesama pegawai bersangkutan.
  - b. Sumber Daya Manusia
    - 1) Sumber daya manusia yang dimiliki oleh Dinas Perkebunan Provinsi Sulawesi Selatan sangat mendukung proses penerapan Sistem Informasi Akuntansi Keuangan Daerah. Sumber daya yang handal/memenuhi baik dalam jumlah maupun kapasitasnya.

- 2) Pelaksanaan program-program pelatihan rutin untuk peningkatan kualitas SDM, seperti pelatihan Sistem Informasi Akuntansi Keuangan Daerah, pendampingan dan diklat Sistem Informasi Akuntansi Keuangan Daerah.
  - 3) Adanya kesadaran para pegawai untuk meningkatkan kemampuan mereka dengan curah pikir/diskusi yang lebih khusus tentang penerapan Sistem Informasi Akuntansi Keuangan Daerah antar pegawai serta kordinasi yang baik.
  - c. Adanya sikap implementor yang menerima/setuju atas pelaksanaan penerapan Sistem Informasi Akuntansi Keuangan Daerah serta dukungan dari kepala kantor/pemimpin.
  - d. Struktur birokrasi yang berperan dalam pengawasan atas jalannya sistem aplikasi komputersasi Sistem Informasi Akuntansi Keuangan Daerah.
7. Nilai-nilai yang dimiliki Dinas Perkebunan Provinsi Sulawesi Selatan sehingga mampu menerapkan Sistem Informasi Akuntansi Keuangan Daerah antara lain :
- a. Nilai integritas
  - b. Nilai profesionalisme, komitmen
  - c. Nilai sinergi
  - d. Nilai ketulusan
  - e. Nilai kesempurnaan

8. Kualitas informasi yang dihasilkan dari penerapan Sistem Informasi Akuntansi Keuangan Daerah, antara lain:

1) Ketepatan waktu.

- a) Penerapan Sistem Informasi Akuntansi Keuangan Daerah sangat membantu pegawai akuntansi dan pelaporan dan menyusun laporan keuangan, sehingga pegawai termotivasi untuk menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan waktu yang telah ditentukan.
- b) Adanya antisipasi yang baik terhadap segala bentuk kegagalan terhadap sistem yang dapat mengakibatkan tertundanya proses pengolahan data keuangan seperti pengadaan cadangan server.

2) Akurasi

Hampir tidak pernah terjadi keluhan antar SKPD atau pengguna laporan keuangan selama penerapan Sistem Informasi Akuntansi Keuangan Daerah. Hal ini membuktikan bahwa informasi yang dihasilkan dari pengolahan data pada sistem dapat diandalkan.

3) Relevan

- a) Sistem bekerja secara otomatis dengan mengklasifikasikan transaksi sesuai dengan jenisnya masing-masing.
- b) Setiap bagian pada sistem saling berhubungan satu sama lain.

## 5.2 Saran

Adapun saran yang dapat diajukan penulis sebagai hasil dari penelitian ini dalam rangka penerapan Sistem Informasi Akuntansi Keuangan Daerah pada organisasi instansi lain yang tertarik untuk menerapkan Sistem Informasi

Akuntansi Keuangan Daerah sebagai sistem komputerisasi pengolahan data keuangannya yaitu perlu pengembangan atas pemahaman pegawai tentang maksud dan tujuan dari penerapan Sistem Informasi Akuntansi Keuangan Daerah serta memahami faktor-faktor pendukung apa yang perlu dimiliki oleh setiap instansi untuk dapat menerapkan Sistem Informasi Akuntansi Keuangan Daerah seperti yang dimiliki oleh Dinas Perkebunan Provinsi Sulawesi Selatan baik dalam hal komunikasi, pengembangan sumber daya manusia dan yang paling penting adalah sikap dari para implementor serta komitmen pemimpin dan pengawasan. Hal ini yang turut mendukung penerapan Sistem Informasi Akuntansi Keuangan Daerah sehingga mampu menghasilkan informasi keuangan yang berkualitas, laporan keuangan dapat disajikan tepat waktu serta dapat diandalkan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Ainil Mardiah, 2010. *Analisis Sistem Akuntansi Keuangan Daerah*. Penerbit Universitas Islam Riau, Pekanbaru.
- Bodnar, George HI willian S. Hopwood, 2006. *Accounting Information System*. Sevent Edition, USA.
- Darise, Nurlan, 2008. *Akuntansi Keuangan Daerah (Akuntansi Sektor Publik)*. PT Indeks, Jakarta.
- Diana Anastasia dan Lilis Setiawati. 2011. *Sistem Informasi Akuntansi*. Penerbit CV.Andi Offeset. Yogyakarta.
- Grizzle dan Pettinjohn. 2002. *Teori Implementasi Kebijakan*, ([http://www.eprints.undip.ac.id/24007/1/Ari\\_Eko\\_widyantoro.pdf](http://www.eprints.undip.ac.id/24007/1/Ari_Eko_widyantoro.pdf)). Diakses pada tanggal 20 januari 2009.
- Halim, Abdul. 2001. *Akuntansi Keungan Daerah*. Jakarta: Salemba Empat.
- Halim, Abdul, 2002. *Akuntansi Sektor Publik akuntansi Keuangan Daerah*. Edisi pertama , Salemba empat, Jakarta.
- Halim, Abdul, 2004. *Akuntansi Keuangan Daerah*. Penerbit Salemba Empat, Jakarta.
- H.M, Jogyanto. 2003. *Teori Portofolio dan Analisis Investasi*. Edisi II, BPEEUGM. Yogyakarta.
- Kristanto Andri. 2007. *Perancangan Sistem Informasi Dan Aplikasinya*. Penerbit Gava Media. Klaten.
- Marshall B. Romney, Paul John Steinbart, 2006. *Accounting Information System*. Ninth Edition, Prentice Hall.
- Mulyadi. 2001. *Sistem Akuntansi*. Jakarta: Salemba Empat.
- Prihadi Toto. 2012. *Memahami Laporan Keuangan Sesuai IFRS dan PSAK*. Penerbit PPM, Jakarta.
- Soemarso, 2009. *Akuntansi Suatu Pengantar*. Buku Ke 2. Edisi 5. Jakarta: Salemba Empat.
- Subarsono. 2005. *Analisa Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Widjajanto, Nugroho. 2001. *Sistem Informasi Akuntansi*. Erlangga: Jakarta

Witarto, 2004. *Memahami Sistem Informasi*. Penerbit Informatika, Bandung

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 Tentang Pedoman Keuangan Daerah.

